



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI V DPR RI
DENGAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 5
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 1 April 2024
Waktu : Pukul 14.14--17.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI - Jakarta
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023;
2. Membahas Program Kerja Tahun 2024;
3. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023;
4. Lain-lain.
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.S.i (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan)
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., (Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI)
Hadir : **A. Pimpinan**
1. Lasarus, S.Sos., M.Si. (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan)
2. Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)
3. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Gerindra)
4. Robert Rouw (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Nasdem)
B. Anggota DPR RI:
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)
5. Sri Rahayu
6. Djenri Alting Keintjem, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

7. Drs. Hamka B Kady, M.S.
8. H. Tubagus Harul Jaman, S.E.
9. Ilham Pangestu

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

10. Sudewo, S.T., M.T.
11. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
12. Drs. H. Muladi, M.MA.

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

13. Drs. H. Tamanuri, M.M.
14. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
15. Hj. Sri Wahyuni, S.Sos.
16. Drs. Fadholi, M.I.Kom.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-
PKB)**

17. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
18. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
19. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
20. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
21. H. Syafiuddin, S.Sos.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

22. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P
23. Willem Wandik

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-
PKS)**

24. Dr. H Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-
PAN)**

25. H. Boyman Harun, S.H.
26. Hj. Hanna Gayatri, S.H.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)**

27. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

Izin

- :
1. Ir. Sudjadi (F-PDI Perjuangan)
 2. Sarce Bandaro Tandiasik, S.H., M.H. (F-PDI Perjuangan)
 3. Ir. Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan)
 4. Cen Sui Lan (F-PG)
 5. DR. H. Ali Mufthi, S. AG., M.Si. (F-PG)
 6. Ilham Pangestu (F-PG)
 7. Muhammad Fauzi, S.E. (F-PG)

8. Iis Rosyita Dewi, S. Hum., M.M. (F-Gerindra)
9. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. (F-Gerindra)
10. Drs. H. Soehartono, M.Si. (F-Nasdem)
11. H. An'im Falachudin Mahrus (F-PKB)
12. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T. (F-PKS)
13. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T. (F-PKS)
14. Ir. H. Sigit Sosiantomo (F-PKS)
15. KH. Toriq Hidayat, Lc. (F-PKS)

Undangan

- :
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Dr. Ir. Mochamad Basuki Hadimoeljono M.Sc.).
 2. Para pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI .

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita mulai rapat kerja kita pada siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
beserta seluruh jajarannya,
Hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada rapat siang hari ini sebagaimana jadwal yang sudah kami sampaikan dengan agenda rapat yang juga sudah kami sampaikan melalui undangan.

Sebelum dilanjutkan, perkenankan kami mengucapkan selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadan 1445 Hijriah bagi Saudara-Saudara yang menjalankannya.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani oleh 25 Anggota dari 55 Anggota Komisi V DPR RI dengan 7 unsur fraksi yang berbeda.

Maka, sesuai ketentuan diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat ini sudah memenuhi kuorum dan izinkan kami membuka rapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.14 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat beserta seluruh jajarannya yang sudah memenuhi undangan kami pada rapat siang hari ini. Rapat pada hari ini akan kita fokus kepada membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023

dan program kerja Kementerian PUPR tahun 2024 serta hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023 dan lain-lain yang dipandang perlu.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Saudara Menteri,
hadirin yang kami hormati,

Untuk agenda pertama terkait evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023 Komisi V DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bagaimana hasil akhir pencapaian realisasi anggaran Kementerian PUPR sesuai saran, masukan yang telah diberikan oleh Komisi V DPR RI di rapat-rapat sebelumnya.

Terkait dengan agenda kedua yaitu itu pembahasan program kerja tahun anggaran 2024 perlu kami sampaikan, bahwa pagu Kementerian PUPR tahun anggaran 2024 ya yang telah disahkan pada bulan September tahun 2023 yang lalu adalah sebesar 147,37 triliun.

Tadi saya mendapatkan informasi di bahan paparan kita ada tambahan dari PHLN dan SBSN ya. Dari PHLN itu ada tambahan 1,17 triliun, kemudian dari SBSN ada tambahan 1,19 triliun dan itu belum kita sahkan pada rapat yang lalu. Nanti mungkin Pak Menteri bisa sampaikan sekalian di paparan sebagaimana bahan paparan yang sudah ada pada kita semua, Pimpinan maupun Anggota Komisi V DPR RI.

Kemudian terkait agenda pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Namun demikian, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2022 masih terdapat 30 temuan dan 102 rekomendasi. Temuan tersebut antara lain terkait kesalahan penganggaran belanja barang, kesalahan penganggaran belanja modal, dan pelaksanaan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami harapkan bisa mendapatkan penjelasan yang komprehensif sampai sejauhmana temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023 tersebut sudah ditindaklanjuti serta langkah-langkah preventif yang ditempuh agar temuan-temuan tersebut tidak terulang lagi di waktu yang mendatang.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR antara lain yang pertama melakukan koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024, yang kedua mempercepat perbaikan dan pemulihan seluruh bangunan infrastruktur di daerah yang terkena bencana, dan yang ketiga meningkatkan dan memperluas pelaksanaan, pelaksanaan infrastruktur berbasis masyarakat.

Bapak-Ibu sekalian,

kali ini kembali PUPR mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Mungkin tidak ada salahnya kita beri *applause* buat Menteri PUPR.

(TEPUK TANGAN DARI PESERTA RAPAT)

Atas prestasi yang luar biasa ini tentu tidak mudah ya dengan dinamika dan anggaran yang cukup besar setiap tahun di Kementerian PUPR untuk bisa mendapatkan WTP secara berturut-turut dari dari BPK RI.

Baik.

Pak Menteri, barangkali itu pengantar rapat yang dapat kami sampaikan.

Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan bahan paparannya sesuai dengan undangan rapat yang sudah kami sampaikan.

Kami persilakan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Bismillahirrahmanirahim.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Selamat sore.*

Pimpinan,
Anggota Komisi, dan
Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Sebelumnya, pertama-tama kami mohon maaf dan terima kasih atas dilaksanakan Raker pada hari ini yang telah tertunda beberapa kali karena memang jadwal kita yang berubah-ubah. Kemudian saat ini kami juga ditemani oleh semua pejabat Eselon I di Kementerian PUPR.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, tiga hal yang akan kami laporkan sesuai dengan undangan rapat kerja dari Komisi V DPR RI: pertama adalah evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023, yang kedua pelaksanaan program kerja tahun 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 ini, dan pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2023.

Ibu-Bapak sekalian yang terhormat dan kami hormati,

Untuk agenda pertama tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023 dapat kami laporkan sebagai berikut. Pagu awal Kementerian PUPR tahun 2023 adalah 125,22 triliun dan mengalami penambahan sebesar 56,80T, sehingga pagu akhirnya menjadi 182,02 triliun. Progresnya sampai akhir tahun 2023 kemarin, progres keuangan mencapai sembilan puluh lima pers koma sembilan puluh persen, lebih tinggi daripada tahun 2022 sebesar 94,03% dengan progres fisik semuanya 97,11%.

Kemudian pagu tahun 2023 yang terserap secara efektif tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai agenda prioritas nasional, antara lain :

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek strategis nasional seperti bendungan, jalan tol, pembangunan dan rehabilitasi irigasi, sistem penyediaan air minum, dan program 1 juta rumah. Khusus untuk pengembangan rehabilitasi, irigasi, dan bendungan nanti kami akan laporkan sedikit tentang kontribusi kita dalam perluasan luas tanam untuk meningkatkan produksi padi tahun baru dua puluh empat ini. Tahun 2023 sebanyak 13 PSN telah selesai, ya ini 6 proyek bendungan, 4 proyek jalan tol, 1 proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), 1 proyek rumah susun, dan 1 unit eh 1 proyek BPS.

2. Tahun 2023, melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah berupa penanganan jalan sepanjang 2.873 kilometer dan jembatan sepanjang 2,7 kilometer dengan biaya total semua 14,6 triliun. Manfaatnya adalah untuk menangani jalan non nasional yang rusak, meningkatkan kemantapan jalan daerah, membuka akses dari keterisolasian, mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, dan memantapkan konektivitas dengan jalan nasional dan jalan tol.

Inpres Jalan Daerah ini kita lanjutkan pada tahun 2024 ini, sekarang sedang dalam penelaan dengan Kementerian Keuangan untuk penyusunan DIPA-nya. Total tahun 2024 ini mudah-mudahan bisa kita alokasikan 15 triliun. Kemudian juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana seperti yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi, pertama adalah bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah, beberapa proyeknya sudah diresmikan kemarin oleh Bapak Presiden minggu lalu, yaitu untuk menangani pasca bencana sebesar 2,12 triliun di bidang sumber daya air dalam merehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Gumbasa. Kemudian meningkatkan Irigasi Banggai.

Kemudian untuk melaksanakan perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan antara lain, rekonstruksi jalan Kalawara, Kulawi, Sirenja rehabilitasi dan rekonstruksi peruas jalan dalam Kota Palu dan pembangunan jalan dan jembatan akses utama kawasan Huntap permukiman. Kemudian di bidang permukiman, pembangunan gedung Anutapura *medical center* yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan seperti UIN yang juga diresmikan kemarin.

Kemudian juga Tandolako, Kemudian pembangunan infrastruktur pemukiman kawasan pendukung Huntap dan pembangunan instalasi penjernihan air dan pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah. Kemudian pembangunan hunian tetap pasca bencana di Tondo 2 dan Talise. Kalau kita sekarang ke Palu memang nyatanya kelihatannya memang cukup berubah menjadi lebih tertata dan lebih rapi dengan jalan-jalan yang lebih lebar.

Dan yang kedua, bencana gempa bumi di di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melanjutkan penanganan pasca bencana dengan anggaran sebesar 1,13 triliun melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan antara lain penggantian jembatan, penanganan longsor, dan rekonstruksi rehabilitasi jalan. Kemudian merehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pendidikan, ratusan prasarana pendidikan, dan prasarana umum lainnya, penanganan beberapa SPAM di Cianjur dan SPAM hunian tetap di Simagalista Murnisari, kemudian pembangunan hunian tetap di desa Sirnagalih sebanyak 200 unit dan di desa Murnisari sebanyak 151 unit.

Ibu-Bapak sekalian yang terhormat dan kami hormati,

Pada tahun 2023 ini dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar 24,97 triliun dengan rincian untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang sekarang sudah selesai dan menunggu penuhnya air untuk dapat diresmikan dan pembangunan *intake* air baku Sungai Sepaku, embung di KIPP dan embung Mentawir serta drainase utama.

Di bidang Dirjen Sumber Daya Air sebesar 11,43 triliun adalah pembangunan jalan tol IKN, jalan kerja logistik di kawasan inti pusat pemerintahan, jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur dan sisi barat, pembangunan jalan lingkaran Sepaku, jalan akses persemaian Mentawir, pembangunan bandara IKN dan pembangunan dermaga logistik.

Di Ditjen Cipta Karya, 8,29 triliun antara lain penataan sumbu kebangsaan I dan II, penataan sumbu Triparja *land development* kawasan 1A, 1B, dan 1C dari pengembangan dari KIPP dan pembangunan kantor dan istana Presiden, gedung kantor kementerian 1, 2, 3, dan 4 IPA beserta jaringannya, dan IPAL air limbah beserta jaringannya, dan TPST.

Dirjen Perumahan sebesar 4,24 triliun antara lain untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi rumah tapak jabatan menteri serta hunian ASN, TNI dan Polri.

Dirjen Bina konstruksi melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN, manajemen penataan pengadaan barang dan jasa terkait dengan Pokja IKN.

Bapak-Ibu sekalian yang terhormat dan kami hormati,

Dengan demikian, maka capaian pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 antara lain adalah di Bidang Sumber Daya Air menyelesaikan 6 Bendungan yaitu Bendungan Lolak yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, Bendungan Tiu Suntut di NTB, Bendungan Karian di Banten dan sudah diresmikan Bendungan Cipanas di Jabar yang akan segera diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden, Bendungan Sepakus Semoi yang menunggu penuhnya air tinggal 1 meteran, kemudian Bendungan Ameroro di Sultra menunggu izin, Pak, baik untuk bisa diresmikan.

Dan selain itu juga, terdapat 50.477 hektar pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4, mohon maaf, jadi untuk pembangunan jaringan irigasi seluas 50.477 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 426.000 hektar dan penyediaan air baku 3,39 meter kubik per detik serta pengendalian banjir dan pengamanan pantai sepanjang 150,35 kilometer.

Infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan, 47.000 kilometer jalan tol, 546 kilometer jalan baru dan 8.234 jembatan dan 2.146 meter *flyover* atau *underpass*.

Di Bidang Permukiman dibangun 1.143 liter per detik SPAM, air limbah untuk 44.795 KK, pengelolaan sampah untuk 139.642 KK, dan penanganan pemukiman kumuh seluas 198 hektar, penataan bangunan gedung seluas 60.000 meter persegi, pembangunan dua kawasan PLBN Jagoi Babang dan yang satu di ...(rekaman suara kurang jelas) Kalimantan Utara serta 827 unit pembangunan dan rehabilitasi gedung pendidikan olahraga dan pasar.

Kemudian infrastruktur perumahan membangun 4.724 unit rumah susun, 4.311 unit rumah khusus, dan 150.231 unit rumah swadaya dengan 43.000 unit bantuan PSU rumah susun rumah umum. Infrastruktur yang telah selesai sebagian telah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan turut dihadiri oleh para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI antara lain 2 bendungan, 5 pengendalian banjir atau kolam resensi, 4 ruas Jalan tol, 2 *flyover* jalan layang, ruas-ruas jalan Inpres Jalan Daerah yaitu antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sumut, Sulsel, dan Sulut, 4 SPAM, 2 sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu, 7 penataan kawasan, 2 pasar, 1 sarana pendidikan yaitu kampus Universitas Nahdlatul Ulama, dan 6 tempat pemrosesan akhir sampah modern dan 4 rumah susun.

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya air *eh* sumber daya manusia telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan antaranya melalui pelatihan orientasi untuk CPNS dan PPPK sebanyak 408 peserta, pelatihan bela negara untuk pegawai Kementerian PUPR sebanyak 489 peserta, pelatihan pendampingan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 199 orang, pelatihan teknik dan manajemen untuk 7.100 orang ASN, pendidikan magister super spesialis 703, kemudian untuk pendidikan vokasi Politeknik Pekerjaan Umum sebanyak 724 orang dan program pendidikan melalui beasiswa LPDP sebanyak 102 orang.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi telah dilakukan pembinaan dan sertifikasi sebanyak 57.950 orang yang terdiri dari 18.142 orang tenaga kerja reguler, 9.841 orang tenaga kerja advokasi, dan 29.967 orang tenaga kerja khusus untuk mendukung IKN.

Bapak Ketua, Anggota Komisi V DPR yang terhormat dan kami hormati,

Seperti yang saya sampaikan tadi dalam rangka berkontribusi dalam meningkatkan atau menambah luas tanam dari hasil pembangunan yang sudah kita lakukan dari total luas tanam, jadi tambahan, jadi total luas, total penambahan luas tanam artinya intensifikasi dari hasil pembangunan kita ada 395.00 hektar dari luas fungsional 735.000 hektar sebagai berikut:

a. Pembangunan bendungan baru sebanyak 36 unit yang telah selesai dan dapat difungsikan untuk peningkatan luas tanam dari irigasi seluas 63.000 hektar dari totas fungsional 233.000 hektar. Jadi ini menambah IP27% dan kenapa baru 63.000? karena jaringan irigasinya ada yang sedang dibangun ada yang sudah dibangun ini yang sudah selesai jaringan irigasinya bisa menambah 63.000 hektar.

b. Kemudian rehabilitasi jaringan irigasi yang tadi kami sampaikan seluas 426.000 hektar bisa menambah luas tanam seluas 255.000 hektar setara dengan 60%. Jadi yang sebelumnya 140% dengan rehabilitasi jaringan irigasi ditingkatkan menjadi 200%, jadi 255.000 hektar

c. Pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk 3.676 sumur air tanah bisa menambah luas tanah yang tadinya tidak ada sumur *nggak*, ada tanaman, dengan adanya sumur ada air bisa menambah 75.000 hektar tanam *eh* luas tanam. Selain itu, 4 embung irigasi telah menambah luas tanam seluas 471 hektar.

Jadi ini kontribusi kita dalam meningkatkan luas tanam irigasi. Jikalau 1 hektar bisa menghasilkan 5 ton saja dengan 300 atau 400.000 hektar berarti sudah bisa meningkatkan menambah produksi minimal 1,5 juta ton atau 2 juta ton.

Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati,

Agenda kedua yaitu pelaksanaan program kerja tahun 2024. Tahun 2024 temanya adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan 7 prioritas nasional. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka fokus program tahun 2024 yakni:

1. Menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 lebih banyak kepada semester I kecuali kalau mendapat dispensasi boleh di semester II/2024. Dikecualikan lagi beberapa paket kegiatan pembangunan infrastruktur *multi years* kontrak yang baru saja dimulai di Oktober 2023 seperti pembangunan Bendungan Cabean, pembangunan Bendungan

Cibeet, pembangunan Bendungan Cijurey, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Cibeet Cijurey di Jawa Barat, Karangnongko di Blora di Jawa Tengah, Jawa Timur, Pelosika di Sulawesi Selatan, Cabean tadi di Pati Jawa Tengah dan jalan lingkar Nias itu baru dilaksanakan pada akhir 2023 sehingga sebagian bisa diselesaikan tahun 2025 dan ini pun harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Kabinet.

2. Untuk tahun 2024 fokus programnya adalah melaksanakan program infrastruktur yang menjadi direktif Presiden. Pasar, pasar ini ada kurang lebih 32 pasar, kebanyakan adalah hasil kunker Bapak Presiden. Kemudian sekolah, stadion. Stadion ada 22 stadion yang kemarin salah satunya kami tinjau di Pamekasan, di stadion MU di Madura United dan instruksi Presiden yaitu Inpres Jalan Daerah dan Inpres Air Minum dan Air Limbah. Jadi melihat keberhasilan Inpres Jalan Daerah, Bapak Presiden menyetujui adanya Inpres Air Minum dan Air Limbah. Tujuannya adalah untuk mempercepat sambunganrumah tangga bukan membangun IPA baru. Jadi banyak IPA baik IPA baru yang terutama yang apa gabungan itu dilengkapi segera di...dibangun jaringan rumahnya sambungan rumahnya itu melalui Inpres Air Minum dan AirLimbah ini.

Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati,

Pagu awal Kementerian PUPR tahun 2024 adalah 147,37 triliun mengalami penambahan sebesar 2,37 triliun menjadi 149,74 triliun dengan rincian penambahan berasal dari luncturan SBSN sebesar 1,19 triliun dan percepatan hutang luar negeri sebesar 1,17 triliun, sehingga totalnya menjadi 149,74 triliun yang dialokasikan untuk masing-masing Unor.

Sekretariat Jenderal 600,6 miliar,
Inspektorat Jenderal 92,93 miliar,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 48,84 triliun,
Ditjen Bina Marga 56,56 triliun,
Ditjen Cipta Karya 33,05 triliun,
Perumahan 9,26 triliun, Ditjen PU 106, eh Ditjen Pembiayaan
Infrastruktur 160,76 miliar,
Ditjen Bina konstruksi 598,56 miliar,
BPSDM 427,64 miliar, dan
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 143,56 miliar.

Ibu-Bapak dan Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati,

Rincian rencana kegiatan tahun 2024 per unit organisasi tersebut adalah sebagai berikut: pertama, pembangunan 28 bendungan terdiri dari dua bendungan baru yaitu Pelosika di Sulawesi Tenggara dan Kedung Langgar di Jawa Tengah. Kemudian 7 bendungan *on going*, yaitu untuk yang sedang berjalan yaitu Bendungan Cibeet, Cijurey di Jawa Barat ini sebenarnya untuk pengendalian Citarum hilir, karena kami melihat Citarum hulu sudah lebih terkendali sehingga kita bangun Cibeedt, Cijurey ini untuk pengendalian banjir Citarum hilir untuk menangani banjir di Karawang dan sekitarnya.

Kemudian Bendung Gerak Karangnongko di Jawa Timur di Sungai Bengawan Solo, kemudian Bendungan Cabean di Pati Jawa Tengah, Jenelata di Sulawesi Selatan, Riam Kiwa di Kalsel, Mbay di NTT serta penyelesaian 19 bendungan yang selesai antara lain Kerto di Aceh, Lau Simewe di Sumut, Tiga Di Haji di Sumsel, Leuwi Keris Jawa Barat, Jlantah di Jawa Tengah, Jragung di Jatim, dan Bendungan Meninting di NTB.

Selanjutnya adalah pembangunan irigasi seluas 33.000 hektar yaitu di Lhok Guci, Jambu Aye, Lematang, Wanggar, DI Slinga dan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 184.000 hektar DI Rentang, Di Rengrang, Cihaur Glapan dan Saddang.

Kemudian pembangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai 152,69 kilometer yaitu di *floodway* Sikambing, kemudian banjir kali Bekasi, pengamanan Pantai Jakarta, dan pengamanan Pantai Cilacap, Jawa Tengah. Dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,9 meter kubik per detik di Bendung Karet Krueng Aceh, air baku Bendungan Kuningan, air baku Tuk Uleng Jateng, dan air baku Lani Jaya di Papua. Kemudian pembangunan embung 24 unit Tukad Unda KIPP-IKN dan Embung Pulau Hiri di Maluku Utara.

Di Ditjen Bina Marga sebesar 56,56 triliun, kegiatan utamanya adalah peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 50,8 kilometer yaitu dukungan konstruksi untuk jalan tol Serang - Panimbang, Semarang - Demak, dan Bayung Lencir-Tempino di jalan tol Sumatera.

Kemudian pembangunan jalan sepanjang 301 kilometer antara lain di luas Lahewa Afulu batas Nias di Sumut, Teluk Buton - Klarik Kepri, Muhammad Yamin - Bangkinang Riau, Lingkar Utara Jatigede Jabar, Lingkar Tuban dan Lingkar Utara Lamongan Jatim. (*Suara kurang jelas*) meneruskan Pansela di Jawa Timur, Rasau Jaya batas negara Kalbar dan Bypass mamminasata Sulsel, Kwatisore - Kampung Muri Papua dan Lingkar Sorong Papua Barat.

Kemudian juga dukungan jalan dan jembatan di daerah prioritas pariwisata Borobudur sepanjang 12,37 kilometer, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5,45 kilometer, antara lain jembatan Krueng Tamiang, Nanga Semangut-Putussibau, jembatan paralel perbatasan 5 Kaltim, Akelamo Maluku Utara dan Elelim-Mamberano Papua. Peningkatan aksesibilitas *flyover* sepanjang 2.477 meter, *flyover* gelombang di Sumsel, Nurtanio Jabar, Aloha Jatim, Cangkuk Jateng, dan *underpass* Gatot Subroto di Sumut.

Preservasi rutin jalan sepanjang 47,763 kilometer jembatan nasional sepanjang 570 kilometer dan rehabilitasi revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya lainnya.

Ditjen Cipta Karya, pembangunan utamanya adalah ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 3.000 liter per detik.

SPAM IKK di Toba Sangau, SPAM Sintang, SPAM Bintang Bano NTB, SPAM Tapung Hulu Kampar, SPAM Kota Sengkang, SPAM Katulampa Bogor, SPAM Kamijoro Kulon Progo, SPAM regional Wosusokas Jawa Tengah, dan perluasan SPAM sebanyak 20.463 sambungan rumah tangga di antara lain pembangunan SPAM regional Jatiluhur 1, SPAM berbasis masyarakat di 1.183 desa, SPAM Simas.

Kemudian sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 15.550 kepala keluarga Jakarta *sewerage development project* zona 1, IPLT Samosir, dan SPALD Kota Banda Aceh serta IPAL di KIPP - IKN. Sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 114.310 KK TPA Samosir, Cikalong, Cianjur, TPST Magelang dan lainnya serta pembangunan Sanimas di 1.546 lokasi TPS3R di 173 lokasi dan sanitasi lembaga pendidikan keagamaan di 1.279 lokasi.

Penataan kawasan strategis pariwisata nasional dan kegiatan strategis lainnya seluas 327 hektar antara lain di Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Dieng, serta kawasan pemukiman mendukung rumah khusus warga *eks* Timor Timur di Kupang, kawasan Gelora Sumbawa, serta pembangunan IKN seluas 51 hektar dan pelaksanaan PISEW di 738 kecamatan dan penekanan kemiskinan ekstrem di 22, di 20 lokasi. Pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 37.880 meter persegi, antara lain pembangunan gedung Pusat Amanah di Aceh, *memorial living park* di Pidi, rehabilitasi kantor Kabupaten Sigi, krematorium Batam, Masjid Bakti Bapak Emak Kabupaten Jombang, dan TSTH Pollung tahap 2.

Kemudian masih di Cipta Karya adalah pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 11 kawasan dan pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 14 unit. Pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah madrasah sebanyak 485 unit antara lain di PTN PTKIN sebanyak 23 unit dan Universitas Malikussaleh UIN Tadulako, Politek Majalengka, RSPTN Jember, Mataram Halu Oleo, dan lain-lainnya.

Kemudian rehabilitasi dan renovasi pasar sebanyak 25 pasar, antara lain Pasar Natar, Pasir Gintung di Lampung, kemudian Jogja, Banjarsari Pekalongan, Jongke Surakarta, Baros Kabupaten Serang, Kolpajung Pamekasan dan Kota Padang serta Banyuwangi. Dan pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 30 unit yaitu prasarana PON Aceh, Sumut sebanyak 13 *venue* asrama Pangalengan, renovasi 21 Stadion Cibubur *Sport Center*, dan *Paralympic Training Center* di Kabupaten Karanganyar.

Untuk Ditjen Perumahan yang menyerap 9,26 triliun dilakukan pembangunan rumah susun sebanyak 578 unit, kemudian melanjutkan pembangunan rumah khusus, pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN, dan rumah khusus untuk pasca bencana dan konflik sosial di Lebak Banten serta Pulau Haruku sebanyak 553 unit. Kemudian pembangunan rumah swadaya sebanyak 55.446 unit dengan pembangunan PSU 17.770 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di beberapa provinsi.

Kemudian untuk dukungan manajemen, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan BPSDM, BPW, Sekjen, Ditjen sebesar 2,02 triliun. Alokasi anggaran kegiatan dengan pola padat karya tahun 2024 sebesar 7,22 triliun dengan perkiraan serapan tenaga kerja dua puluh 297.000 orang.

Pada tahun 2024, tahun ini dukungan infrastruktur dasar IKN seperti tadi halnya yang di 2023 dialokasikan di 35,45 triliun. Kalau 2023 tadi adalah 24 triliun, jadi sekitar 60 triliun totalnya terdiri dari Ditjen Sumber Daya Air yaitu untuk pengendalian banjir di DAS Sanggai.

Kemudian penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi serta pembangunan embung di KIPP. Bina Marga 16,67 triliun melanjutkan pembangunan jalan Sumbuh Kebangsaan sisi barat dan timur, jalan *feeder* listrik di kawasan IKN jalan tol seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C1, serta bandara IKN di sisi landasan udara.

Ditjen Cipta Karya sebesar 11,44 triliun antara lain untuk membangun IPAL dan bangunan pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaan IPAL, TPST, penataan Sumbuh Kebangsaan, pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap 1, bangunan gedung pada kawasan istana kepresidenan, kawasan kantor kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung IKN.

Dirjen Perumahan 5,76 triliun antara lain lanjutan pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan Rusun ASN dan Hankam. Progres pembangunan IKN per 21 Maret 2024 sebanyak 89 paket konstruksi dengan biaya 68,8 triliun terdiri dari *batch* pertama tahun 2020 sampai dengan Maret 2023 sebanyak 40 paket senilai 24,8 dengan progres fisik 78,5% dan *batch* kedua Maret 2023 sampai tahun 2024 sebanyak 49 paket senilai 44 triliun dengan progres 26%.

Ibu-Bapak sekalian,

Mungkin agak sedikit fokus, di IKN ini dengan progres yang tadi untuk yang *batch* pertama sebesar 78,5%, antara lain air minum. Air minum karena tadi pembangunan apa *intake* dan jaringan serta reservoirnya, mudah-mudahan sudah bisa masuk kepada rumah-rumah dan kantor bulan Juni nanti dan ini adalah air minum bukan air bersih.

Kemudian besaran indikatif untuk pelaksanaan Inpres Jalan Daerah sebesar 16,25 triliun dengan rincian 1,25 triliun untuk kegiatan yang bersifat *committed* jadi *multiyears* dari 2023 dan jadi dari 2023 ada *multiyears* yang membutuhkan anggaran 1,25 triliun dan 15 triliun kebutuhan tahun 2024 yang akan dipenuhi dari anggaran belanja tambahan di tahun 2024. Target penanganan jalan dan jembatannya sepanjang 2.225 kilometer. Sekarang sedang diproses penganggarannya di Kementerian Keuangan.

Bapak Ketua,
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Yang ketiga adalah pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2023. Pada semester 1 tahun 2023, Kementerian PUPR menerima 17 laporan hasil pemeriksaan dengan total 374 rekomendasi senilai 354,99 triliun, 1000 eh 1,41 juta US Dolar dan Euro 334.000 dengan rincian:

- 1 LHP atas laporan tahun 2022 dengan 102 rekomendasi senilai 149 miliar dan 40.000 Dolar serta 344.000 Euro;
- 1 LHP PDTT yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pengadaan barang dan jasa tahun 2021 sampai dengan semester triwulan 3 tahun 2022 dengan 24 rekomendasi senilai 108 miliar;
- 1 laporan hasil pemeriksaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas konsesi jalan tol sampai dengan semester 1 tahun 2022 dengan 35 rekomendasi;
- 1 LHP kinerja atas optimalisasi waduk multiguna dan pelaksanaan modernisasi irigasi untuk meningkatkan pemenuhan layanan irigasi tahun 2020-2022 dengan 38 rekomendasi;
- 1 LHP atas laporan keuangan bagian anggaran belanja subsidi BA 999.07 subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit perumahan tahun 2022 dengan 12 rekomendasi senilai 80... 880 juta;
- 12 LHP atas laporan keuangan pinjaman hibah luar negeri dengan 161 rekomendasi senilai 96 miliar dan 130 juta Dolar.

Dari total 374 rekomendasi tersebut, Kementerian PUPR telah menindaklanjuti sebanyak 358 rekomendasi atau sebesar 95,72% dan sedang proses perbaikan tindak lanjut sebanyak 16 rekomendasi. Pokok temuan pada masing-masing LHP di atas dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. LHP atas laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2022 yang memperoleh opini WTP terdapat 30 temuan dan 102 rekomendasi senilai 149,84 miliar, 40.000 Dolar, dan 334.000 Euro. Adapun status tindak lanjut atas 102 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi dan perbaikan tindak lanjut sebanyak 3 rekomendasi;

2. LHP atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai berikut: pengadaan barang dan jasa tahun 2021 sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022 terdapat 7 temuan dengan 26 rekomendasi dan senilai 108 miliar. Status tindak lanjutnya adalah 26 rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti. Konsesi jasa tol sampai dengan semester 1 tahun 2022

terdapat 16 temuan dengan 35 rekomendasi. Status tindak lanjut atas 35 rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti;

3. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja optimalisasi waduk multiguna dan pelaksanaan modernisasi irigasi untuk meningkatkan pemenuhan layanan irigasi tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 semester 1 terdapat 13 temuan dengan 38 rekomendasi senilai 0 Rupiah. Status tindak lanjut 38 rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti;

4. LHP atas laporan keuangan bagian anggaran belanja subsidi yaitu subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit perumahan tahun 2022 terdapat 4 temuan dengan 12 rekomendasi senilai 80 juta. Status tindak lanjut atas 12 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi dan perbaikan tindak lanjut sebanyak 2 rekomendasi;

5. 12 LHP atas laporan keuangan pinjaman hibah luar negeri terdapat 53 temuan dengan 161 rekomendasi senilai 96 miliar dan 133... 137... 1 juta US Dolar. Status tindak lanjutnya adalah 161 tersebut... status tindak lanjut atas 161 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 150 rekomendasi dan perbaikannya 11 rekomendasi.

Dengan demikian, berdasarkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2005-2023, sesuai Informasi Pemantauan Tindak Lanjut/SIPTL BPK RI telah ditindaklanjuti dengan status selesai sebesar 71,3%.

Selain itu, sampai dengan saat ini masih terdapat 646 rekomendasi yang sedang dalam proses penelaahan BPK RI dan apabila itu diterima maka akan meningkatkan capaian Kementerian PUPR dalam menyelesaikan LHP sebanyak 85,43%.

Ibu-Bapak Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Selanjutnya, Kementerian PUPR terus berupaya melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI tersebut dengan upaya langkah-langkah percepatan sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja satuan kerja/Satker termasuk juga berbasis pada progres penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK RI;

2. Penyederhanaan dan pembagian tugas yang jelas antara APIP, unit, kepatuhan internal Unor dan Satker dalam melaksanakan penyesuaian rekomendasi pemeriksaan BPK RI;

3. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Balai Unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian paket pekerjaan;

4. Pemantauan dan pembahasan dengan seluruh pihak terkait terutama dalam BPK RI secara berkala;

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan menatausahakan BMN khususnya pengelolaan persediaan untuk percepatan hibah BMN yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPR RI Komisi V yang terhormat dan kami hormati,

Demikian laporan kami dan kami mohon arahan serta diskusi selanjutnya.

Atas perhatian Bapak dan ibu sekalian, kami haturkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih Pak Menteri atas paparannya.

Pak Menteri yang kami hormati,
Teman-teman Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Saya memberitahukan hadir mengikuti rapat kita pada kali ini ada rombongan mahasiswa magang, Pak, dari Kampus Merdeka.

Tepuk tangan buat teman-teman, *adek-adek* mahasiswa.

(TEPUK TANGAN DARI PESERTA RAPAT)

Hadir kurang lebih 25 orang dari 350 orang yang sedang magang di DPR ya. Coba berdiri *adek-adek* mahasiswa, ya ya berdiri semua.

Kita kasih *applause adek-adek*.

(TEPUK TANGAN DARI PESERTA RAPAT)

Ya, kita... silakan duduk, ini calon-calon Anggota DPR untuk periode yang akan datang. Mudah-mudahannya Pemilunya lebih baik *deh* ya.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Yang dari Kalbar mana?
Ada yang dari Kalbar?

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ada yang dari ada yang dari Kalbar, *nggak?* Oh tidak ada ini, kemarin dari Sulawesi Selatan ada waktu ketemu, saya ada coba berdiri nah ini masanya Pak Hamka ini tapi bajunya warna merah, Pak Hamka, silakan duduk, *Dek.*

Baik.

Teman-teman sekalian,

Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, pertama ini adalah jadwal rapat rutin yang kita selalu kita lakukan ya setiap kali kita memasuki masa sidang tentu yang ingin kita ketahui adalah progres resapan *eh* serapan yang sudah dicapai oleh pemerintah dan terkait juga dengan hasil pemeriksaan BPK dan termasuk perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas temuan-temuan yang di dapat dari hasil pemeriksaan BPK tersebut. Ya, dimana tadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.

Teman-teman sekalian,

Saya rasa hari ini kita bulan puasa ya dan saya berharap ini rapat tidak perlu panjang ya karena saya berharap nanti sebelum buka puasa kita sudah selesai.

Pak Menteri,
Teman-Teman,

Tadi sudah menyampaikan kepada kami sebelum rapat mulai terkait dengan padat karya saja sebenarnya, Pak Menteri, yang ingin teman-teman dengarkan ya. Saya rasa kalau yang lain-lain ini normatif ya, tinggal kita lihat nanti di bahan rapat yang sudah kita pegang pada saat ini. Di sini sudah disampaikan secara detail oleh Pak Menteri termasuk tadi soal tambahan anggaran yang berjumlah 2,37 triliun. Tadi sudah disampaikan juga alokasinya ke mana saja, saya rasa demikian.

Di meja Pimpinan, sudah ada 3 Anggota yang mendaftar ya, yang pertama Pak Dewo mungkin kalau mau diambil, kemudian bersiap-siap Pak Syafiuddin mungkin tidak perlu terlalu panjang.

Saya persilakan, Mas Dewo, kalau ada yang mau disampaikan, ya.

F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri PUPR dengan semua jajaran yang saya hormati,

Ini untuk menjalin tali silaturahmi yang lama tidak tidak komunikasi *aja* Pak Menteri dianggap begitu *aja* ini *refreshing*. Ya, mudah-mudahan Pak Menteri dalam rapat kali ini kondisi *enjoy* meskipun dalam bulan puasa.

Saya hanya ingin memberikan masukan kepada Pak Menteri PUPR bahwa begitu pentingnya infrastruktur bagi perekonomian negara kita. Anggaran untuk Kementerian PUPR itu sudah sangat fantastis sampai 182 triliun, itu signifikan sekali dan barangkali tahun 2023 ini lah jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kenyataan di lapangan, itu sebenarnya tuntutan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat besar, baik itu infrastruktur air, sumber daya air, maupun infrastruktur jalan, bina marga, maupun cipta karya yang SPAM.

Saya tadi pagi itu mendengarkan ulasan dari Menteri Keuangan bahwa meskipun negara itu kita punya hutang yang besar tapi dalam kategori yang aman. Semua negara itu pasti punya hutang baik di di World Bank maupun di IMF maupun di negara-negara yang mau memberikan hutang. Dalam undang-undang negara kita, sepanjang itu tidak lebih dari 60% pendapatan negara, itu masih dalam kategori aman. Ibu Menteri Keuangan kondisi hutang luar negeri negara kita saat ini adalah 35% jadi dalam batas yang sangat-sangat aman.

Dengan kondisi yang semacam ini, saya hanya ingin memberikan masukan supaya diambil satu manfaat, kesempatan oleh Menteri PUPR jadi tidak hanya bagaimana menguraikan APBN dari postur tubuh APBN kita di-*breakdown* dalam direktorat-direktorat kemudian dalam kegiatan-kegiatan tapi karena besarnya tuntutan infrastruktur, itu tolong masih ada ruang untuk meskipun kita hutang luar negeri, asalkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan perekonomian negara kita. Kalau kita lihat yang dipaparkan oleh Pak Menteri sudah sangat bagus jalan itu begitu detailnya ke semua provinsi tetapi saya melihatnya itu adalah sebagian besar atau hampir semuanya itu *existing, gitu ya, existing*.

Untuk terobosan pembangunan jalan yang baru dalam rangka menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor tertentu ini masih, masih sangat kurang. Saya melihat di Provinsi Jawa Tengah, Pak Menteri, Dieng itu merupakan objek wisata yang sangat eksotis, betul-betul hamparan alam yang sangat luas dengan pemandangan yang super indah, gitu. Tapi sayang, akses untuk menuju ke sana itu masih belum ada, minim sekali, sementara jalan tol Jakarta-Semarang, Semarang-Surabaya itu sudah terbangun cukup lama. Dari objek wisata Dieng sampai dengan jalan tol itu hanya kurang lebih sekitar 35 kilometer.

Andai kata itu diaksakan yang itu menjadi wisata yang terbuka, tidak kalah menarik dengan Mandalika, tidak kalah menarik dengan super wisata yang lain, itu. Ini terobosan-terobosan yang semacam inilah saya ingin memberikan masukan kepada Pak Menteri dan barangkali di Jawa Timur juga

banyak yang seperti itu, Jawa Barat juga seperti itu. Jadi pergerakan perekonomian itu akan tetap bisa berjalan, itu yang pertama.

Yang kedua, setiap kali musim banjir, setiap kali musim hujan, pasti mendatangkan banjir. Sekarang ini yang banjir cukup besar adalah di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kudus, dan Padi, itu. Saya melihatnya ini bukan karena curah hujan yang sangat tinggi karena curah hujan yang sangat tinggi dengan durasi waktu yang lama itu juga terjadi di beberapa kali sebelum kali ini.

Tapi mengapa banjir yang sangat besar terjadi di kali ini. Ini tolong dikoreksi kinerja BBWS Pemali Juana karena mungkin tidak detailnya dia melakukan pengecekan kondisi tanggul atau bendung atau kan embung yang ada di sana sehingga menyebabkan tanggul itu jebol. Dan anehnya, ketika banjir yang kedua, itu jebol di tempat yang sama begitu. Itu apakah mungkin karena tidak telitinya BBWS Pemali Juana melakukan pengecekan pengamanan di semua infrastruktur di wilayah kerjanya atau karena faktor lain, ya. Tapi, semua ini memang, memang harus dilihat.

Kemudian berikutnya, Inpres Jalan Daerah. Ini sangat terima kasih ini karena memang reinkarnasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, kemudian turun ada Inpres Nomor 3 Tahun 2023 sehingga tahun 2023 ada Inpres Jalan Daerah, 2024 ada Inpres Jalan Daerah lagi yang anggarannya itu semakin bertambah, kemarin sekitar 14 triliun sekarang ini 16 triliun.

Tetapi mohon maaf, mengingat kondisi jalan di daerah baik jalan kabupaten maupun Jalan provinsi yang memang perlu penanganan oleh karena kondisi yang sangat rusak, bisa saja karena APBD-nya tidak cukup atau bisa saja visi, misi kepala daerahnya yang tidak relevan dengan visi, misi Bapak Presiden yang memprioritaskan infrastruktur, sehingga banyak jalan daerah yang dalam kondisi rusak karena terlambat penanganan.

Nah, ini saya hanya ingin memberikan masukan supaya Inpres Jalan Daerah yang 16,2 triliun 2024 ini bisa ditambah lagi, Pak. Mungkin di gelombang kedua ada anggaran lagi karena yang kemarin 2023 itu sangat dirasakan betul perekonomian di daerah. Mudah-mudahan nanti di 2024 ini ada gelombang kedua untuk Inpres Jalan Daerah.

Saya kira itu, Pimpinan. Saya tidak mau yang saya terakhir memberikan apresiasi kepada Pak Menteri di tahun 2023 kinerjanya super bagus dapat BTP dari BPK ini kerja yang sangat luar biasa.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Mas Dewo.

Pak Syafiuddin.

F-PKB (H. SYAFIUDDIN, S.SOS.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat-sahabat semuanya,
Pak Menteri dengan jajaran yang saya hormati yang saya banggakan,

Terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2023 dan pelaksanaan program kerja 2024 ini, saya tidak terlalu banyak ingin mengoreksi. Saya malah apresiasi kepada Pak Menteri karena di pelaksanaan APBN 2023 penyerapan anggaran sudah agak maksimal sampai 93-95%. Juga hasil pemeriksaan BPK dapat pemeriksaan BPK RI ini sudah dapat WTP. Kita sebagai Anggota Komisi V sangat mengapresiasi juga kepada Pak Menteri PUPR dan jajarannya.

Namun, yang perlu saya sentil sedikit, Pak Menteri, karena ini sebentar lagi tanggal 5 ini kita sudah masa reses jadi bulan Mei baru ketemu lagi, ini juga ada aspirasi dari beberapa teman-teman karena dari beberapa teman-teman ini ada yang terpilih, ada yang masih belum mujur, Pak Menteri. Jadi kita ingin tahu terkait dengan kepastian dari program padat karya karena itu penting bagi kami terutama di Dapil dan sehingga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan jajaran atas kerja samanya selama ini. Dengan program padat karya ini, kami juga menjadi suatu yang salah satu variabel sehingga kami dipilih kembali di periode 2024-2029.

Terus yang kedua, yang kedua, terkait daerah pemilihan juga, Pak Menteri. Kami lagi-lagi iri terhadap beberapa teman-teman Komisi V yang berdampingan dengan Bapak Presiden dan Bapak Menteri PUPR untuk meresmikan beberapa program di Dapilnya masing-masing. *Alhamdulillah* sampai detik ini kemarin itu dari Kementerian Perhubungan, Bapak Presiden hadir di Sumenep. Tapi, untuk di Kementerian PUPR ini, saya berharap walaupun seremonial atau seperti apa Pak Menteri, di sini juga di 2024 ada pembangunan Pasar Kolpajung, ya, di Pamekasan.

Mungkin kalau itu selesai atau di pertengahan atau gimana kami rindu terhadap Presiden Joko Widodo untuk hadir di Madura atau mungkin, karena lagi-lagi ini ada janji Presiden, Pak Menteri, terkait Perpres 80 Nomor 2019, kami hampir kurang lebih 6 bulan ya masa jabatan akan habis walaupun saya terpilih kembali. Saya berharap salah satu dari di Perpres 80 khususnya di Madura ini lagi-lagi kami menagih janji untuk bagaimana realisasi dari Perpres 80/2019, minimal pembangunan *islamic center*, Pak Menteri. Walaupun Pak Menteri juga jabatan masih kurang 6 bulan, ya, 6 bulan lagi, mudah-mudahan

siapapun presidennya yang terpilih saya secara pribadi mendukung Pak Menteri untuk terpilih kembali. Mudah-mudahan ini menjadi catatan dan PR sehingga diakomodir untuk presiden berikutnya terkait dengan Perpres 80 ini.

Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wallahul muffawiq Ila aqwamit thoriq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ini aspirasi atau usulan? usulan, ya? usul kan Dewo, ya? Dewo usulnya.

Aspirasi dari PKB, *oh Pak Basuki the best lah*, tepuk tangan buat Pak Basuki, *lah*.

(TEPUK TANGAN DARI PESERTA RAPAT)

Kalau *ndak* milih Pak Basuki rugi dia. Pak Syarif, bersiap-siap Pak Irwan.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H. M.H.):

Terima Kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi V serta seluruh teman-teman komisi V,
Pak Menteri serta seluruh jajaran,

Berkaitan dengan evaluasi program yang telah disampaikan tadi berkaitan tetapi saya sebelum sampai ke hal-hal yang lain, saya ingin menyampaikan kembali, Pak Menteri, karena kemarin pada saat peresmian ternyata besok malamnya macet lagi, Pak. Ternyata memang jalannya itu karena berarah satu jalan turunnya pendek, akibatnya itu yang membikin kemacetan. Maka, saya berharap ini ya atas kebijakan Pak Menteri, mungkin ini bisa dipercepat untuk pelebaran jalannya itu sehingga kemacetan itu tidak terulang lagi. Ini tentu merupakan satu aspirasi yang disampaikan.

Yang kedua, kami berharap berkaitan dengan program padat karya ini, beberapa yang telah kita sepakati beberapa waktu yang lalu, saya berharap ini bisa terwujud, Pak. Karena memang dari apa yang telah terealisasi sekarang memang dirasakan sangat minim sehingga apa yang telah menjadi, yang sudah kita programkan di masing-masing wilayah ini nampaknya sangat minim sekali untuk dipenuhi.

Maka saya berharap, kepada Pak Menteri berkaitan dengan walaupun kami ini selesai sudah pileg tetapi ternyata, ya, pada saat kita kemarin itu banyak dimintakan hal itu. Dan itu juga mungkin saya juga terima kasih

kepada Kementerian PUPR yang tentunya akibat program ini salah satu sebab terpilihnya kali kami kembali gitu karena populer akibat terutama program BSPS, Pak. Karena mungkin karena masyarakat tidak mampu mendapatkan itu ya mereka merasa terbantu. Selain itu juga, beberapa daerah yang kita masukkan itu mengurangi *stunting* akibat program ini. Saya kira sangat bermanfaat.

Kemudian saya kira kaitan yang lain-lain, saya tidak ini cuma yang tentu yang program-program yang masih untuk kita tindak lanjuti saya mohon untuk bisa direalisasikan.

Kemudian yang terakhir, Pak, berkaitan dengan kemarin ada persoalan pembangunan jembatan di wilayah saya jembatan gantung, ya, mungkin ini apa ya sosialisasinya kurang sehingga ada sedikit mengalami kendala kaitan dengan apa karena itu lalu lintas umum, perairan, sehingga ada terkendala berkaitan dengan kendaraan air, motor air, ya. Ini mungkin perlu peningkatan gitu tapi saya berharap jangan mengurangi program yang ada *gitu*, ya, ya. supaya bisa ditinggikan. Kemarin juga sudah didiskusikan dengan Pak Dirjen pada waktu di Kalbar.

Saya kira itu saja, Pak.

Terima kasih.

*Wallahul mufawiq Ila aqwamit thoriq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Syarif.

Pak Irwan, silakan.

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ketua Komisi V, beserta Pimpinan komisi V yang saya hormati, serta Rekan-rekan komisi V yang saya banggakan,
Bapak Menteri PUPR, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen,
Para direktur keluarga besar Kementerian PUPR yang saya hormati,

Sebelumnya saya mengapresiasi luar biasa Kementerian PUPR dalam membangun bangsa selama 10 tahun ini, khususnya 5 tahun terakhir ini. Saya doakan Pak Basuki juga bisa terus berkontribusi membangun bangsa inidan masuk Kabinet Indonesia Maju berikutnya.

Terkait penilaian WTP, tentu ini juga kami apresiasi termasuk keberhasilan PUPR terhadap proyek strategis nasional, ada 13 PSN yang

selesai di 2023 dan tentu ada lanjutan di 2024. Mudah-mudahan juga bisa tuntas di minimal di Oktober ataupun di akhir tahun 2024 ini.

Kemudian terkait pembangunan IKN, kami mengapresiasi, Pak Menteri, beberapa kali kami juga mendampingi. Tentu dengan fokusnya pembangunan IKN ini kami mengingatkan Kementerian PUPR agar tetap memperhatikan keberlanjutan pemerataan pembangunan infrastruktur di 10 kabupaten, kota yang ada di Kaltim.

Kami ingatkan bahwa terkait preservasi jalan nasional, Pak Dirjen Bina Marga, masih ada PR kita di dari batas Tenggara, Senoni - Kota Bangun, kemudian dari Kota Bangun lanjut ke Melak. Ini mudah-mudahan bisa tuntas, ya, *multiyears*-nya kalau enggak bisa selesai akhir 2024 kalau bisa lanjut di 2025 karena ini sangat penting, ini salah satu segmen yang belum tuntas diluar segmen yang lain yang sudah luar biasa kita tuntaskan selama 4 tahun ini.

Kemudian lanjutan segmen Tering Long Bagun untuk di Kute Barat ke Mahakam Ulu, kita sudah selesaikan dari Ujoh Bilang Mamahak besar sampai dengan jembatan pembangunan jembatan di Sungai Ratah. Harapan saya bisa lanjut, *nih*, dari segmen Sungai Ratah ke Tering-nya, karena kalau ini bisa tuntas, *alhamdulillah* bisa menghubungkan saat ini Mahakam Ulu dengan Kute Barat dan ini progres yang ada ini pun dari Ujo Bilang ke sampai Juni ini *Insya Allah* selesai sampai di jembatan Ratah itu sudah luar biasa. Kami berterima kasih untuk Kementerian PUPR.

Kemudian, segmen Bontang ke Sangatta sampai ke Simpang Perdau Bengalon untuk poros jalan nasional di utara Kaltim ini tinggal PR ini, Pak. Kalau bisa tuntas juga di akhir tahun ini, sudah progres di lapangan. Mudah-mudahan dari Bontang, Sangatta Simpang Perdau Bengalon ini juga tuntas akhir tahun karena dari Samarinda Bontang, *alhamdulillah* sudah tuntas tersambung mulus.

Kemudian terkait Inpres Jalan Daerah. Terima kasih hampir setengah triliun realisasi Inpres Jalan Daerah di tahun 2023, 2024. Kalau bisa lanjutannya tahun ini dari rencana 15 triliun setanah air ini. Prioritasnya kemarin kita sudah tinjau bersama Direktur Pembangunan Jalan, Bu Wida beserta kepala balai, ada dermaga ferry penyeberangan yang dibangun Kementerian Perhubungan, anggarannya lumayan sudah selesai tetapi aksesnya sekitar 4 kilometer dari jalan nasional itu, itu belum... belum ada, sehingga dermaga ferry ini enggak fungsional.

Padahal ini sangat bagus, ya, menghubungkan antar provinsi maupun dalam antarkota. Dermaga ferry yang dibangun Kemenhub ini sehingga saya minta ini dituntaskan di 2024 akses jalan dermaga ferry Tanjung Keramat ini Kutai Timur sekitar 4 kilometer termasuk juga akses jalan ke pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau. Saya pikir kalau IJD di Kaltim untuk tahun 2024-2025 ini, ini bisa salah satu menjadi prioritas.

Kemudian yang penting juga adalah lanjutan ini Pak Direktur terkait rehab dan renovasi sarana prasarana sekolah di maupun madrasah di Kaltim. Kita sudah tiap tahun sejak mulai Pak Iwan dulu lanjut lagi Bu apa Bu Dirjen, Bu Diana, kita terus, ya, luar biasa puluhan sekolah tiap tahunnya kita rehab di Kaltim ini. Saya harap ini terus karena masih banyak ya masih puluhan sekolah apalagi dengan adanya IKN ini sangat-sangat berhubungan bagaimana prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan bisa merata dan adil, ya, jangan hanya di IKN-nya tetapi di sekitar IKN maupun di 10 kabupaten, kota terkait sarana prasarana pendidikan di Kaltim ini.

Terakhir, terkait padat karya untuk di Kaltim, saya minta Ke Dirjen Sumber Daya Air ada masalah mengenai P3TGAI itu dari usulan kami baru 10 lokasi yang diinput. Saya minta ini apa namanya ratusan lokasi yang lain juga bisa masuk dalam inputan usulan kami itu termasuk juga PISEW dan Sandes.

Kalau yang lain, *alhamdulillah* relatif progres tetapi untuk P3TGAI, PISEW, Sandes agar bisa diakomodir karena itu sudah usulan masyarakat, ya, saya *ndak* ada kepentingan pribadi di situ, itu murni usulan dari desa, usulan dari petani, ya, usulan dari BKAD, Badan Koordinasi Antar Kecamatan Antar Desa di kecamatan. Jadi ini Jangan sampai karena kemudian proses *inputing* dan lain-lainnya apa namanya ada ada masalah, ini kemudian *nggak* terakomodir.

Ini mungkin pesan saya, Pimpinan.

Terima kasih banyak apresiasi untuk Kementerian PUPR dan apresiasi untuk seluruh Anggota Komisi V. Terima Kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Iwan.

Selanjutnya Pak Syahrul Aidi, silakan.

Siap-siap Pak, Mulyadi.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, LC., M.A.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Ketua yang saya hormati, dan Anggota Komisi V,
Pak menteri beserta seluruh jajarannya,

Di bulan puasa ini memang suasana lebih hening, ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan bagi yang melaksanakan puasa dengan baik *alhamdulillah* masih bisa produktif di saat puasa.

Pak Menteri, pertama dalam evaluasi ini mengapresiasi kinerja Pak Menteri dengan seluruh jajarannya sampai ke tingkat balai yang ada di Riau juga, apresiasi sekali. Komunikasi dan kerja sama kemitraan terjalin dengan baik dan itu menjadi salah satu indikator barangkali menunjang kami bisa terpilih kembali untuk periode 2024-2029.

Dan kehadiran kami di Komisi V ini memang sangat ditunggu oleh rakyat Riau karena ternyata pada periode-periode sebelumnya, jarang sekali dari Riau ini duduk sebagai di Komisi V. Kami mengucapkan terima kasih terasa sekali manfaatnya dengan program-program yang ada tapi tentu saja kami tidak akan pernah berhenti untuk selalu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Riau.

Secara umum tadi disampaikan bahwasanya penilaian BPK terhadap kinerja Pak Menteri itu sangat bagus sekali udahan menjadi *husnul khatimah* karena ini adalah tahun terakhir ya bukan *husnul khatimah* meninggal ini maksudnya ini pekerjaan karena salah satu doa nabi itu adalah "*Allahumma ahsin 'aaqibatana fil umuuri kullihaa, Ya, Allah berikanlah penutup dari setiap pekerjaan kami itu yang terbaiknya*".

Mudah-mudahan ini tahun terbaik bagi Pak Menteri apalagi saya lihat bahwasanya salah satu catatannya adalah menyelesaikan seluruh program-program yang memang harus selesai kecuali beberapa catatan tadi saya baca seperti pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey dan seterusnya.

Tapi secara umum saya lihat mudah-mudahan seperti di kami ada program IPAL yang ada di Pekanbaru, mudah-mudahan bisa tuntas, jalan-jalan kembali normal bahkan lebih baik walaupun sempat kemarin terjadi sedikit polemik di masyarakat tidak sabar ya apa namanya setelah bekas galian itu kemudian tidak cepat dipulihkan pembangunan jalannya. Kemudian program-program kecilnya *Insyallah* selesai.

Hanya saja, Pak Menteri, pasca hujan yang beberapa bulan kemarin itu banyak sekali jalan-jalan yang ada di Riau itu rusak terutama jalan yang kita bangun Pekanbaru, Kuansing batas Sumbar ini belum pernah ditangani sebesar ini. Kemarin kita anggarkan itu *multiyears* kalau enggak salah 270 miliar, tapi kemarin pas banjir itu rusak lagi, Pak. Karena memang penanganannya kebanyakan minor kalau tidak salah, belum rekonstruksi itu hanya berapa persen dan ini memang puluhan tahun tidak tertangani, Pak. Jadi, mereka berharap masyarakat berharap karena pasca banjir itu rusaknya sangat parah lagi berharap bahwasanya ketika direhab, rehabnya rekonstruksi karena dasarnya itu juga memang sangat-sangat masih rendah kualitasnya. Begitu juga jalan Simpang Lago Sorek, Pak, ini 2 bulan akses jalan tidak bisa dilewati.

Nah, ini ada usulan kemarin saya ditelepon oleh Pak Gubernur:”*usulkan, Pak Syahrul*”, katanya, agar bisa jalan ini bisa menggunakan kaki gajah. Memang berat, apa namanya biaya besar tapi kemarin 2 bulan itu tidak bisa dilewati dan itu adalah jalan yang sangat vital ekonomi masyarakat betul-betul hancur, Pak, akibat banjir tersebut. Kemudian Pak Menteri bahwasanya masyarakat Riau dikagetkan dengan kenaikan tarif tol yang cukup besar signifikan khususnya Pekanbaru, Dumai, Pak, dan mereka dapat pula di *facebook* di media sosial itu bahwasanya di Malaysia katanya tetangga mereka itu di lebaran ini tolnya justru gratis, ya, ya, maklumlah karena mungkin bertetangga dengan Malaysia, mereka perbandingan. Jadi kemarin di bulan Maret ada kenaikan tol yang cukup besar di Pekanbaru, Dumai. Nah, apakah ini bisa di namanya, dipertimbangkan, Pak.

Kemudian saya mendapatkan catatan, kemarin ada kunjungan saya pasca Pileg itu, MAN Lipat Kain, Pak, kebakaran. MAN Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, kebakaran. Saya diminta untuk menyampaikannya di rapat ini sehingga menjadi perhatian. Mudah-mudahan bisa di apakah sisa anggaran atau bagaimana karena anak-anak ini sekarang sekolahnya sudah tidak di sana lagi harus menumpang di tempat-tempat lain.

Kemudian jembatan gantung Kauman, di jembatan gantung yang sudah kita bangun oleh Kementerian PUPR sudah diserahkan memang ke daerah, Pak.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Yang kebakaran tadi apa? yang kebakaran tadi, Mas?

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, LC., M.A.):

Apa, Pak?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Yang kebakaran tadi apa?

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, LC., M.A.):

MAN 1 Lipat Kain, Pak, MAN 1 Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Kemudian jembatan gantung Desa Bukit Kauman ini, Pak, di Kuansing, Kabupaten Kuansing, mereka sudah bersurat. Jembatan ini sudah dibangun oleh Kementerian PUPR kemudian sudah diserahkan, Pak, cuma tanahnya ini bergeser sehingga merobohkan jembatan ini kemarin. Jadi, mereka juga tidak

kuasa lagi untuk ini kan memang, memang sudah diserahkan ini apakah ada perlakuan khusus dari kementerian karena ini sangat vital juga jembatan ini.

Kemudian, Bapak, terakhir saya apresiasi dan sangat berterima kasihlah apa namanya aspirasi masyarakat sudah tertampung. Cuma, ketika saya nilai-nilai pertimbangkan dan melihat anggaran-anggaran khususnya ini khususnya untuk BWS, Pak, sekali lagi, BWS tidak seimbang rasanya dengankewenangan yang ada di BWS Riau itu dengan anggaran yang tersedia.

Pertama, tahun ini tidak ada lagi bangunan penahan ombak di pantai, Pak, untuk pantai tidak ada lagi karena SBSN sudah selesai katanya. Nah, sementara APBN dan APBN kita tidak jalan, padahal ada yang sudah ada apa namanya sudah ada DED-nya sudah kita bangun dan yang sudah sering saya sampaikan yaitu akibat ombak ini akibat abrasi di pantai, itu banyak sekali kelapa-kelapa yang masyarakat itu harus terjun ke laut dan menyebabkan mereka tidak punya penghasilan. Kalau tidak ini diamankan, ini akan mengancam ribuan bahkan jutaan hektar kelapa.

Kemudian, yang kedua untuk sungai, Pak. Kewenangan BWS Riau itu ada empat sungai, tetapi sesungguhnya sungai besarnya 5 karena Sungai Kampar itu dihitung satu padahal jalurnya dua. Nah, kasusnya ratusan kasus setiap tahun hanya 5 titik saja, Pak, 5 titik saja. Mohon ada keadilan, keseimbangan, pemerataan untuk untuk anggaran BWS Riau ini karena setiap kami turun yang selalu menjadi keluhan masyarakat itu adalah turap tebing sungai, Pak.

Terima kasih atas perhatiannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Syahrul Aidi.

Selanjutnya Pak Mulyadi, bersiap-siap Ibu Novita.

F-GERINDRA (DRS. H. MULYADI, M.MA.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran mitra Komisi V dari Kementerian PUPR, serta

Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, pemilik masa depan Indonesia yang ikut hadir,

Izin, Pak Menteri, saya tertarik justru di prolog laporan, Pak Menteri, terkait gerakan bangga buatan Indonesia, Pak. Saya mengapresiasi itu, Pak, di samping tentu mengapresiasi semua kinerja Bapak yang luar biasa itu.

Namun beberapa kesempatan kami ikut melaksanakan kunjungan spesifik maupun kunjungan reses dan seterusnya, saya berharap Bapak juga menggelontorkan satu program yang saya kira sangat penting yaitu merawat aset Indonesia, Pak. Karena apa? karena kita begitu gencar melaksanakan pembangunan kemudian selesai difungsikan dan seterusnya dan saya kira perawatannya masih banyak yang memprihatinkan buat saya, Pak.

Suatu saat saya hadir di satu toilet saja, Pak, di destinasi wisata di Labuan Bajo, ya, itu ada satu apa namanya prasasti gitu bahwa itu adalah dedikasi dari Kementerian PUPR, Pak. Bagus, Pak, dari luar tapi pas masuk, mohon maaf, Pak, seperti tidak dirawat. Jadi, saya kira pada saat serah terima ke daerah pun harus ada SOP bukan konteks serah terima aset, Pak. Tapi harusnya ada SOP bagaimana merawat ini supaya tetap nyaman, Pak, ya. Karena terus terang karena saya di Banggar, Pak, dan selalu jadi panitia kerja penerimaan dan pemasukan negara, saya membayangkan *cost of fund* dari dana-dana yang digelontorkan itu, Pak. Mudah-mudahan gerakan merawat aset atau hasil pembangunan Indonesia menjadi gerakan Pak Menteri yang luar biasa ini dan saya kira tidak sembarangan menjadi Menteri PUPR di Indonesia karena begitu luas dan banyak yang harus dikerjakan.

Kemudian, kami berharap juga, Pak, dalam konteks evaluasi, ya, semua hasil-hasil pembangunan harus memberikan nilai tambah, Pak. Di samping dari proyeksi perencanaan untuk apa dan seterusnya, ke depan harus ada nilai tambah dari setiap aset pembangunan yang dilaksanakan termasuk tentunya ada laporan-laporan, Pak, sehingga apakah efektif atau tidak setiap alokasi anggaran yang digelontorkan melalui kebijakan Bapak tadi.

Lanjut, Pak. Saya menyoroti Ditjen Sumber Daya Air. Saya mengucapkan terima kasih, Pak, terutama juga koordinasi yang baik dengan balai Bapak di Jawa barat terutama terkait pembangunan rencana pembangunan yang sekarang masih berjalan, ya, tentang pembangunan benungan Cibeet dan Cijurey, Pak, dan saya terus diakses oleh masyarakat, mudah-mudahan masih *on schedule*, Pak, ya. Karena memang dinamikanya awalnya luar biasa tapi sekarang resistensinya sangat berkurang dan mudah-mudahan momentumnya tidak lewat, Pak, ya. Artinya daya dukung terhadap *support* anggaran dan aspek teknis lainnya betul-betul bisa segera terealisasi sesuai dengan *time table* yang disepakati, Pak.

Kemudian, Pak, terbukanya multi akses jalan, Pak, baik dalam status jalan nasional, provinsi, kabupaten bahkan ada lokasi dana desa yang akhirnya difungsikan menjadi jalan apa lingkungan dan seterusnya, itu akhirnya membuka juga kepada potensi-potensi baru destinasi wisata, Pak.

Nah, termasuk, Pak, saya kemarin melintas Jatiluhur, Pak, ya. Saya melintas Jatiluhur seumur-umur saya baru melintasi jalan itu ternyata bagus, Pak, tapi pas di Jatiluhur-nya, Pak, di area sekitarnya Pak Bob izin, mungkin kapan kita bisa lihat itu destinasi wisata yang saya kira luar biasa tapi jalannya, Pak, di sekitar itu mungkin bisa dikoordinasikan, Pak. Mungkin itu jalan inspeksi tapi saya kira Jatiluhur saja bukan saja menjadi fungsi bendungan dalam konteks infrastruktur pengairan dan seterusnya, Pak. itu juga harus jadi destinasi wisata yang dipertahankan, Pak, karena akses menuju Jatiluhur itu luar biasa banyak ternyata, Pak, sekarang ya cuman ada utamanya yang rusak, Pak. Saya hampir 3, 4 kilo saya melewati jalan itu. Padahal itu indah luar biasa, Pak. Nah mungkin Saya kira kalau itu jalan inspeksi barangkali ada jalan khusus atau bagaimana berkoordinasi dengan Pak Dirjen Bina Marga melalui apa namanya intervensi APBN dan seterusnya, Pak.

Kemudian, untuk Pak Dirjen Bina Marga. Pak, saya terima kasih atas IJD yang masuk ke wilayah kami, Pak, di Bogor yaitu di Kecamatan Sukamakmur. Itu sudah betul-betul sangat menumbuhkan dan menggeliatkan ekonomi dan ngelihat destinasi wisata baru, Pak, serta mengurangi beban Puncak, Pak, dan itu adalah terobosan yang luar biasa maka mudah- mudahan ini bisa dilanjutkan dengan IJD Parung Panjang, Pak Menteri, ya, karena sampai hari ini saya masih masuk di grup Parung Panjang bersatu, Pak, karena kehadiran Bapak ketemu dengan Pak Gubernur itu, itu viral, Pak, di Parung Panjang karena mereka berharap itu betul-betul bisa segera terealisasi, Pak.

Walaupun itu jalan provinsi yang diintervensi kemudian lewat IJD, Pak, itu terus terang itu masih solusi sementara, Pak, karena saya dengar kandungan tambang yang ada di wilayah Parung Panjang itu, Pak, itu lebih dari 70 tahun, Pak, dan itu untuk material bangunan di wilayah Jakarta dan Tangerang. Maka, jalan *existing* yang hari ini akan di-revitalisasi *Insyallah* melalui IJD, itu tetap menjadi solusi sementara, Pak. Solusi permanennya saya kira suka tidak suka harus ada jalan tambang, jalan khusus tambang supaya betul-betul bisa memisahkan antara aktivitas masyarakat dan tambang, Pak.

Kemudian, terkait Jalan tol, Pak, ya. Saya melintas juga di jalan Cisundau beberapa kali, saya *concern* terkait lintasan di kilometer yang menggunakan teknologi geofom, Pak, ya. Itu saya kirakan teknologi pertama yang digunakan di pembangunan jalan tol Pak. Nah, karena masa konsesi dan seterusnya volume kendaraan dan seterusnya dan terutama *concern* kita adalah konektivitas dan keselamatan, saya berharap saya bahkan sudah titip surat untuk mengingatkan karena kita pernah melakukan kunjungan dua kali ke Cisundau.

Saya mengingatkan supaya kontraktornya menjamin bahwa apa yang sudah dilaksanakan melalui material pembangunan menggunakan teknologi geofom, ya, kontraktornya paling tidak memberikan apa namanya semacam jaminan bahwa hal tersebut bisa betul-betul aman, Pak. Kenapa? saya *nggak* kebayang, saya awam, Pak, secara teknis, Pak, tapi pernah sekolah di SMA

di fisika bahwa setiap unsur kimia itu bisa bereaksi gitu. Saya kebayang kalau di bawahnya *geofoam*, kemudian ada tetesan solar atau bensin dan seterusnya, apakah tidak ada terjadi reaksi dan seterusnya, Pak. Saya kira harus ada kepastian terkait keamanan dan kalau perlu saya kira ya kontraktornya memberikan bank garansilah, supaya apa? supaya ada kepastian bahwa itu betul-betul aman dan bisa dipergunakan dengan jangka panjang.

Kemudian saya berterima kasih, Pak, terhadap rencana fungsional gerbang apa namanya tol Cimanggis-Cibitung dan seterusnya kemudian Japek 2 dan seterusnya saya kira itu luar biasa, Pak, terobosan dan saya hanya *concern* terkait gerbang tol, Pak, ya. Kemarin kita menyaksikan sendiri ada gerbang tol yang akhirnya numpuk kendaraan gara-gara kelalaian supir truk dan seterusnya. Apa yang saya ingat di situ, Pak? *Multi lane free flow*, Pak, itu apa kabar itu *multi lane free flow*, Pak, ya. Saya kira itu harus ada *roadmap* yang jelas atau ada *cut off* yang jelas kapan itu akan dilaksanakan, Pak, *nggak* kebayang kalau itu sudah terjadi itu *multi lane free flow* mungkin lebih cepat dan aman, Pak.

Kemudian juga saya menyoroti tentang pembangunan-pembangunan gerbang tol, Pak, ya. Saya tidak mengerti mungkin karena pemahaman teknis. Izin, Pak Menteri, ini curhat saja karena pemahaman teknis sayamenggunakan tol yang *exit* Kota Wisata, Pak, sekarang mulai menyempit gara-gara sedang dibangun gerbang tol baru untuk persiapan menuju ke arah Cibitung. Saya *nggak* ngerti dalam konteks perencanaan orang-orang kita kanjago-jago, Pak, kenapa tiba-tiba jalan tolnya sudah selesai sudah difungsikan gerbang tolnya muncul yang baru-baru, Pak, *gitu*, ya. Kenapa tidak dari awal dan seterusnya? saya *nggak* tahu *nih* aspeknya sistem tertutup, terbuka dan seterusnya saya hanya mempertanyakan itu.

Belum lagi, mohon izin, Pak, ada gerbang-gerbang tol yang kemudian tidak difungsikan, Pak, itu memberikan efek kejut terhadap kendaraan, Pak, saya pikir bayar ternyata cuman melintas, Pak, kenapa *sih* lama benar untuk dibongkar kalau misal tidak difungsikan, ya, kan. Belum lagi, mohon maaf, Pak, kalau misalnya Bapak keluar dari Pemda Bogor masuk ke arah dari arah Cibinong di jalur Pemda itu, itu gerbang tol itu akses ibu kota, kabupaten, Pak, sempit numpuk dan seterusnya, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak berkenan ini melalui pengetahuan Badan Usaha Jalan Tol, saya kira tolong itu di apa namanya di, di, diperhatikanlah.

Terakhir, Pak, saya berharap jalan Pantai Selatan, Pak, ya, dengan luar biasa begitu gencar dan itu saya yakin semangatnya adalah untuk me... apa namanya menguatkan fungsi pemerataan tapi konektivitas menuju pantai selatannya itu harus dimaksimalkan, Pak, sehingga mohon maaf tidak "mubazir" dalam tanda petik, Pak, ya. Kenapa? karena jalannya indah apa namanya bagus dan seterusnya dan saya kira harus ada koordinasi juga dengan Kementerian Perhubungan terkait apa rambu-rambu lintas dan seterusnya.

Nah, ini untuk yang Perumahan, saya mohon izin, Pak. Kemarin kami ada kunjungan spesifik ke Madiun, Pak, melihat hebatnya pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumah susun, Pak, ya. Nah, kami berharap hal-hal seperti itu juga menjadi *concern* dari Dirjen terutama terkait *mindset* atau gaya hidup masyarakat yang akan menempati perumahan- perumahan itu, Pak. Biasanya di rumah-rumah datar, tiba-tiba di lantai 3 lantai 4. Nah, sementara kan ekonomi masyarakat lagi sulit, Pak. Jadi jangan sampai nanti ribut di rumah jadi banyak yang terjun bebas *gitu loh* maksud saya, Pak. Ini bukan ini, Pak, maksudnya harus diantisipasi, Pak, karena kan berita begitu viral di Jakarta banyak sekali tuh orang-orang yang terjun bebas *gitu Masya Allah* ya, mudah-mudahan *mindset* masyarakat bisa diriset untuk bagaimana mereka bisa lebih menjaga keamanan, kebersihan, dan seterusnya.

Nah, terakhir, Pak, untuk IKN, Pak. *Concern* kita adalah berharap bahwa IKN betul-betul tepat waktu, tepat sasaran, dan betul-betul menjadi aset yang bisa kita banggakan dan kita apa jadikan *legacy* terbaik, Pak, dan kami berharap di IKN juga harusnya ada Basuki *University*, Pak, infrastruktur *university*, Pak, itu cocok, Pak, untuk menciptakan banyak tenaga kerja bidang konstruksi di sana, Pak. Jadi saya kira itu usulan untuk di IKN.

Terima kasih, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Mulyadi.

Selanjutnya, Bu Novita. Siap-siap, Pak Djenri.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M):

Terima Kasih Pimpinan.
Pak Menteri apa kabar?
Terima Kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Selamat berpuasa semoga diberkahi sama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, semuanya, *amin*, kalau sekarang *amin*, lancar.

Pak Menteri, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan jajaran atas semua program-program yang sudah turun *gitu* khususnya di Dapil saya. Makanya hari ini saya *dateng*, saya mau,

mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sangat diterima oleh masyarakat di bawah.

Ada IJD, ada jembatan gantung, irigasi, semuanya, Sandes, PISEW, embung, BSPS sehingga karena terima kasih. Berikutnya, harapannya jangan berkurang programnya khususnya BPS dan lain-lain. Pesanan juga dari teman-teman.

Kemudian Pak Menteri, saya mau tanya di sini tadi ada pembangunan pasar. Saya belum lihat mau tanya Pasar Kroya di Cilacap *gimana* nasibnya ada pembangunan apa enggak, Pak Menteri? Kemudian apa namanya, embung, saya beberapa mengusulkan embung di Dapil saya semoga bisa diakomodir, karena saya lihat di sini ada tulisannya Embung Cabean, Jateng saya enggak ngerti Cabean di mana, Pak? ini Cabean apa cabe-cabean, Pak? Cabean, Jateng itu di mana gitu dan harapannya usulan embung saya bisa diterima dan bisa direalisasikan.

Kemudian mau tanya juga tol Bandung-Cilacap itu jadi apa *enggak* ya, Pak, ya? karena apa *kok* ada isu-isu katanya apa batal gitu, mumpung ketemu sama Pak Menteri, saya mau tanya biar jelas *gitu*. Kemudian, Pak Menteri karena kemarin masyarakatnya senang banget tuh IJD, Pak, *cuman* kan yang turun hanya beberapa, kali ini saya ingin mengusulkan mumpung rapat ini ada Pak Hedi, ada jalan Wanareja, Candipura Jalan Cibungur, Majingklak, Wanareja, kemudian Cikukun. Nah, itu usulannya nanti diusulkan lagi, Pak Menteri, mohon bisa dibantu sama ruas jalan Bulupayung karena ini banyak banget yang *seneng*, Pak Menteri. Jadi usulannya memang banyak banget. Jadi Pak Menteri jangan bosan-bosan untuk menerima usulan dari kita.

Kemudian sumber daya air, kemarin di Cilacap juga banjir banyak, terus selain embung, saya mengusulkan Pak Menteri pengendalian banjir di Wanareja lanjutan di situ ada Cikaronjo, ada Sungai Cibaganjing, dan Sungai Serang. Kemudian pengendalian banjir Sungai Cikawung yang kemarin betul-betul banyak korban di sana, rumah-rumah terendam. Kemudian pengendalian banjir di Sungai Cikawung di Cipari di Karang Pucung dan di Cimeneng serta ada Sungai Gatel itu, Pak. Di Kroya ada Sungai Gatel juga perlu dinormalisasi, dikeruk, karena sedikit hujan aja dia udah banjir.

Terakhir, Pak Menteri mau tanya, ini konsep IKN itu, waktu itu saya sempat nanya pembangunan gedung DPR-nya kapan gitu, Pak? apa 2027 apa 2025? karena kalau kantornya menteri aja nanti rapatnya apa di sini gitu, ya, sekilas saja ingin tahu karena beberapa tanya.

Itu aja, Pak Menteri.
Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Bu Novi.

Selanjutnya, Pak Djenri.

F-PDI PERJUANGAN (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH., M.H.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Menteri yang kami hormati,

Luar biasa, apresiasi yang diberikan ke Pak Menteri makanya kalau Pak Menteri kemarin calon presiden atau wakil presiden, pasti saya pilih Pak Menteri, tapi *ndak* begitu jadinya. Luar biasa apresiasi program-program yang dilaksanakan, terobosan, termasuk Inpres-Inpres yang keluar.

Saya lihat ada Inpres yang terbaru yang pembuatan septic tank itu untuk alokasi di... di provinsi-provinsi sudah ada juga. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan, Pak Menteri, ya. Proyek IKN, kita setuju-setuju saja tapi tolong anggaran jangan disedot ke sana semua. Kita setuju tapi ini masyarakat ini beras mahal banget luar biasa susah makannya tapi di IKN-nya kita seakan-akan pemborosan anggaran di sana karena Indonesia belum mau musnah kalau belum bisa 100% kita realisasikan ibu kota di sana, ya bertahaplah sesuai dengan anggaran yang ada. Karena ada kepentingan juga subjektif di situ, kan Pak Presiden menginginkan 17 Agustus kita sudah harus di sana, kenapa? memang sudah mau musnah kita punya negara kalau dipaksakan seperti itu? justru bisa musnah karena negara, kita rakyatnya kelaparan, *ndak* bisa makan. Jadi kita harus objektiflah untuk melihat hal ini. Kita harus memberikan masukan yang yang baik bagi... bagi pemerintahan ini.

Kemudian yang saya sampaikan tadi menyangkut program-program padat karya termaksud beberapa program yang dilaksanakan umpamanya itu PISEW, ternyata juga ada lewat aspirasi pemerintah daerah, ya, untuk jalan-jalan itu tetapi kami tidak menolak itu karena itu bagian dari NKRI juga. Tapi yang terjadi di lapangan, Pak Menteri, yang saya temui, itu ternyata ada juga yang menjadi mungkin ini kasuistis ya jadi lahan bisnis, jadi lahan bisnis.

Saya bisa buktikan, ada kepala-kepala desa yang ditelepon oleh Praskim atau dari ke-PU-an di provinsi, kabupaten, *ndak* tahu kalau koordinasinya ke pusat mereka minta duit setoran ke... ke dari kepala-kepala desa ke atas, *enggak* tahu itu mengalirnya sampai di atas atau enggak atau itu hanya perorangan kemauannya. Saya bisa buktikan, di desa yang saya tinggal itu kepala desanya itu mengaku dia menyetor karena diminta, *ndak* tahu ini apakah ini bagian dari mafia ya terstruktur masif itu lagi ngetop di MK kan sekarang *tuh*.

Saya tidak tahu, tapi tolong ini di...dikoordinasikan dengan baik, ya, karena banyak sekali hukum *tuh* bilang *loh* kita sudah lewat aspirasi Pak Djenri untuk program ini tapi kenapa saya ditelepon lagi oleh Kepala Dinas PU dan orang-orang di ke-PU-an di daerah khususnya, saya tidak tahu, ya di pusat. Tolong dikontrol, Pak, nanti kan yang terbawa-bawah itu kementerian karena ini programnya kementerian.

Baru yang kedua Inpres Jalan Daerah itu luar biasa, ya, termasuk daerah saya, masyarakat itu memberikan apresiasi yang luar-luar biasa bagi kementerian ini Inpres 3 ini tetapi tolong lagi dilihat para kontraktor yang melaksanakan pekerjaan, ya. Ternyata ada kontraktor yang karena modalnya cuma berharap dipencairan tahap-tahap itu, sementara pekerjaannya tidak rampung sebagaimana kontrak yang ada. Itu yang saya temui di lapangan. Saya turun terus, cuma berharap pencairan-pencairan saja ini. Bahkan alat-alat pendukungnya, ya, untuk mengerjakan itu sebenarnya enggak itu sehingga sebenarnya waktu dilelang itu yang menjadi dasar penunjukannya itu apa? Ada yang saya sudah tahu sudah dapat penalti untuk tahun 2023 harusnya selesai Desember sudah dapat penalti tapi program untuk 2024, iya ini apa, saya katakan dugaan ya dugaan, justru *list* nama perusahaan itu masuk lagi 2024 ini, walaupun *e-katalog* nya belum jalan.

Tahun 2024, Pak Menteri, untuk IJD ini yang kami rekom sebagai Anggota Dewan yang berjuang untuk itu bukan hanya pribadi saya, kita semua berjuang di sini, pada akhirnya kita cuma akhirnya merekom aja 2024 aspirasi kita belum terlihat dimana, ya, mungkin karena gelontoran rekomendasi kami kasih ke pemerintah daerah justru mereka yang keluar. Saya dengan beranggapan praduga tidak bersalah, ya, paket-paket pekerjaankhususnya di Dapil saya untuk 2024 ini, sudah ada *by list by name*, ya. Katanya keterlibatan orang-orang petinggi di *nggak* tahu di daerah atau di mana yang mengatasnamakan ini, itu sudah di lima paket itu, enam paket itu sudah ada walaupun *e-katalog* nya belum jalan, *gimana* ini? Ini harus diberantas, Pak Menteri.

Dan Saya sudah katakan, karena koordinasi balainya sudah tidak efektif, tidak jalan, banyak orang yang meminta data kepada saya dan saya siap memberikan itu, ya. Ada apa sebenarnya ini? karena indikasi saya, itu perusahaan yang kerja tahun 2023 sudah masuk di-*list* 2024 walaupun di 2023 dia dapat penalti. Harusnya, dia harus di-*blacklist*, harus di-*blacklist*, Pak.

Yang berikut, tolong, Pak, itu koordinasi lagi dengan kepala-kepala balai itu. Ada kepala balai yang tidak mau saya sudah telepon berapa kali, di-*nggak* mau angkat nanti disuruh Satker-nya yang telepon mungkin *ndak* tahu karena masalah apa, ya, ya. Ada kepala balai yang aspirasi saya pembuatan asrama, Rusun, ya, untuk mahasiswa, peletakan batu pertamanya saja yang merupakan aspirasi saya, saya tidak tahu nanti saya tahu lewat media massa bahwa itu sudah ada peletakan batu pertama, ini kan kurang... Bapak yang bilang kurang ajar, ya, saya kurang wajar kurang ya, kurang apa ya. Jadi kita

dianggap ini cuma sebagai apa pelengkap penderita saja di sini memperjuangkan itu.

Pak Menteri, kasih ke kita aspirasi ini pembuatan itu jadi kami jadi pelengkap penderita, ya. Apalagi kepala balai jalan di sana rangkap kayaknya di... di apa ya Maluku Utara. Jadi sudah sulit ditemui. Saya telepon hujan- hujan saya bilang ke Satkernya kenapa ini jalan nasional itu sudah banyak yang rusak begini, lubang-lubang, bocor dan sebagainya. Dia bilang: "Pak, mohon maaf saya tunggu perintah dari kepala balai saya". Oh, rupanya dia lebih pengin jadi Kepala Balai di Maluku Utara saja, Pak. Di hari-hari begini yang sibuk, ya, memangnya *ndak* ada lagi orang lain di PUPR yang bisa tidakrangkap begitu, ya, itu kebijakan ke dalam, kami tidak mau intervensi tapi kami punya hak kontrol, ya, kami punya hak mengawasi sesuai dengan Tupoksi kami sebagai Anggota DPR RI salah satunya.

Mungkin ini catatan-catatan yang sebenarnya masih banyak karena Pak Ketua bilang jangan lama-lama ya, Pak Djendri, ya. Walaupun sebenarnya kami ada rapat hari ini penting juga tapi saya konsen untuk datang hadir untuk menyampaikan ini. Dan mudah-mudahan ini, sekali lagi saya katakan ini apa yang sampaikan jangan sampai naik ke atas, ke bidang hukum nanti yang akan tangani itu.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Bisa dipersingkat, Pak Djenri?

F-PDI PERJUANGAN (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH., M.H.):

Hah?

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Bisa dipersingkat Pak Djenri?

F-PDI PERJUANGAN (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH., M.H.):

Iya makasih, Pak, sudah selesai.

Selamat berpuasa teman-teman sekalian.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Terima kasih, Pak Djenri, ini Ustadz Madura ini bikin panas lagi ini. Ustadz itu menyejukkan bulan puasa ini.

Ya, selanjutnya Pak Dedi Wahidi, bersiap-siap Pak Irmawan.

F-PKB (DEDI WAHIDI, S.PD.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makasih, Ketua.

Teman-teman Anggota yang saya hormati,
Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas program-program aspirasinya. Yang kedua, saya menyampaikan selamat atas WTP-nya semoga terus setiap tahun WTP di Kementerian PUPR.

Selanjutnya, Pak Menteri, saya menyampaikan apresiasi terhadap program pembukaan sawah baru untuk mengatasi kebutuhan pangan di Indonesia yang merupakan negara agraris. Tapi saya usul, Pak Menteri, tetap memprioritaskan daerah-daerah pertanian yang sudah ada. Seperti di Dapil saya, tanahnya sudah siap, artinya lahannya sudah siap, petaninya sudah siap, tinggal tercukupinya air.

Maka itu program pembangunan irigasi yang ada di Indramayu dan Cirebon segera dipercepat untuk membantu kebutuhan pangan di Indonesia. Biayanya lebih ringan, Pak Menteri, daripada membuka lahan pertanian baru.

Selanjutnya, kepala balai di Dapil saya baik-baik semua Pak, enggak ada satu pun yang jelek, asli, Pak, enggak buat-buat.

F-PDI PERJUANGAN (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH., M.H.):

Pindahin ke saya saja.

F-PKB (DEDI WAHIDI, S.PD.):

Ya, enggak, mungkin cara Pak Djenri barangkali, ya, introspeksi, Pak, enggak ada satu pun yang jelek, yang datang lagi bagus, datang lagi bagus, asli, Pak. Hanya, Pak Menteri, karena di daerah saya daerah yang sangat luas sekali pertaniannya sehingga dibutuhkan alat berat, tambahan alat berat.

Yang kedua tambahan biaya operasional, jangan sampai baru turun seminggu sudah balik karena dibutuhkan di tempat lain, baru turun seminggu kemudian biaya operasionalnya habis. Ini penting Pak Menteri karena, ya, sungai-sungai di sana karena mungkin di daerah Garut, Sumedangnya, hutannya mati sehingga cepat sekali sedimintasinya.

Kemudian ya, yang terakhir Pak Menteri ya, seperti sudah disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu mengenai program padat karya aspirasi tahun ini,

mohon segera ada kepastian supaya kami bisa segera mendistribusi sekaligus mengusulkan. Ini bingung, ini rumah mau dapat berapa, mau didatadulu, nanti kalau dapatnya tidak banyak, ya dikomplain. Mohon hari ini ada kepastian sesungguhnya berapa. Syukur-syukur, ya, sama dengan minimal sama dengan tahun yang kemarin.

Terima kasih, Pak Menteri,
Makasih, Ketua, saya padat dan singkat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Dedi.

Selanjutnya, Pak Irmawan.

F-PKB (H. IRMAWAN, S. SOS., M.M.):

Ya, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan,
Pak Menteri beserta jajarannya,

Saya singkat saja *nih*, Pak Ketua, pertama yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri, bahwa beberapa waktu yang lalu baik secara lisan, maupun secara tertulis, kami berapa kali sudah mengusulkan pembangunan pengaman pantai, Pak Bob, yaitu di Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, Aceh, dan ini kita sebelumnya sudah pernah kita lakukan penanganan darurat kemarin, Pak, karena kondisinya memang sangat sudah parah. Tapi saya lihat di apa kita belum nampak tadi.

Saya berharap kepada Pak Dirjen, walaupun tidak bisa dimasukkan fisiknya di tahun 2024 ini, paling tidak DED-nya harus kita masukkan, Pak. Saya pikir dengan angka 1 miliar, 2 miliar, tidak akan mengganggu kegiatan lain karena ini sudah kita janjikan sama masyarakat yang ada di sana, Pak. Itu satu

Kemudian terkait dengan Inpres jalan, Pak. Kita sudah berapa kali kita usulkan Inpres jalan, semua prosedur sudah kita ikuti, DED-nya sudah disiapkan, kemudian juga kita sudah masuk ke program setia itu, tapi baru-baru ini yang seperti kita ketahui, bahwa sudah ada Sk Menteri yang ditahap pertama. Ternyata di tahap pertama ini, Pak, tidak ada satu pun yang kami usulkan masuk di dalam tahap pertama ini. Saya berharap, mudah-mudahan seperti tahun kemarin ada tahap pertama dan ada tahap kedua, ya kita berharap teman-teman komisi lain juga saya pikir masih ada usulnya belum

tertampung. Saya berharap ada tahap kedua, semoga apa yang kami usulkan ini bisa tertampung di dalam Inpres jalan ini Pak, Pak Dirjen.

Kemudian, terkait dengan padat karya juga. Kami ingin menyampaikan kembali, Pak Menteri, karena ini kita tanggal 5 ini kan sudah masuk masa reses lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Syafiuddin tadi, kita akan bertemu di bulan Mei nanti lagi. Kalau misalnya di masa persidangan ini belum jelas masalah kuotanya berapa, saya pikir ini sudah buram ini semua, Pak.

Saya terus terang saja, Pak Menteri, Pak Ketua, karena sebelumnya ada isu bahwa seakan-akan padat karya ini jumlahnya sama seperti tahun yang lalu dan saya, sudah saya sampaikan kepada konstituen saya, jumlahnya sama seperti tahun yang lalu, dan saya sudah saya data sampai hari ini, Pak. Kalau nanti ini tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya pikir ini kami akan jadi persoalan di lapangan. Maka oleh karena itu, lewat Pak Pimpinan, saya pikir pada saat ini harus kita jelaskan kuotanya biar ini tidak bimbang-bimbang kita di lapangan, Pak.

Saya pikir hanya ini, Pak.

Sekian. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima Kasih, Pak Irmawan.

Kemudian Pak Tamanuri, bersiap-siap Bu Sri.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Para Pimpinan,
Yang terhormat rekan-rekan Anggota Dewan,
Yang kami banggakan Pak Menteri beserta seluruh jajaran,
Pak Sekjen,
Pak Dirjen, dan juga
Eselon I maupun para direktur,

Pertama-tama, kami mengapresiasi hasil yang sudah dicapai padatahun 2023, dimana di bidang keuangan 93, di bidang fisik 97, itu adalah menunjukkan satu kemajuan yang luar biasa. Apalagi sekarang ini akan ditambah kita punya anggaran menjadi 149 triliun. Oleh karena itu, harapan kami adalah ini beririsan dengan apa-apa yang dibangun di tingkat daerah harus mendapat satu, mendapat perhatian.

Di tempat saya, ada jalan Terbanggi Besar sampai Bukit Kemuning, itu sudah berlubang-lubang semua sekitar 75 kilo. Akan tetapi, itu sudah ada tanda-tanda, tanda-tanda diperbaiki. Kenapa? ta, kiri kanan jalannya sudah ada pembersihan, tapi ada yang nanti bikin ruwet, Pak, di pangkal jembatan Terbanggi, dari arah Tanjung Karang, itu kalau mobil sedan enggak bisa lagi itu karena jalannya sudah anjlok. Nah, oleh karena itu, ini memerlukan sedangkan di sini ini, belum ada tanda-tanda perbaikan.

Nah, apabila ini nanti sampai pada waktunya lebaran maka akan menimbulkan satu kekalutan bagi kita. Walaupun bisa diambil jalan tengah bahwa mengikuti jembatan lama. Jadi, jembatan lama itu jadi dua trek. Nah ini, ini kan jembatan baru yang rusak ini.

Kemudian, sebetulnya saya ini agak ngeri-ngeri sedap ngehadapin Pak Menteri sekarang ini, karena beliau ini, sekarang ini punya ilmu bisa mematahkan besi. Nah, itu saya ngeri-ngeri sedap, Pak, matahkan besi, ini saya salah kalau keliru dikit, saya dipanggil beliau, kan kacau itu.

Kemudian, ini bendungan lama, Pak, bendungan '82. Bendungan '82 ini Way Rarem. Sekarang ini, yang dulunya keramba semua keramba- keramba itu sudah hilang. Dulu kan, kedalamannya lebih kurang 20 meter, sekarang tidak lebih dari 7 meter. Nah ini, perlu normalisasi, kalau enggak air kita akan melimpah-melimpah tidak ada gunanya.

Oleh karena itu, harapan saya, selain Bapak bersama Presiden membuat jembatan yang sekian, membuat bendungan sekian banyak, tapi jembatannya *eh* bendungan yang lama juga minta perhatiannya. Ini kan mengalir sekitar dulu pada tahun '82 Pak Soeharto meresmikan ini, ini kata beliau 22.000 hektar, tapi sekarang ini tidak lebih dari 9.000 hektar. Nah, ini tidak terlepas dari akibat pendangkalan itu.

Kemudian mengenai IJD/Inpres Jalan Daerah. Kami bersyukur bahwa ini ada peningkatan sudah 16 triliun. Harapan kami adalah apa-apa yang sudah kami usulkan bersama balai mendapat perhatian karena itu adalah sudah prioritas bagi kami.

Walaupun saya merasa kerugian karena tahun 2023, saya, Pak, dikasih jatah 100 juta karena, karena ketololan daripada bupatinya sampai bulan delapan perencanaan tidak beres-beres, akhirnya saya, hilang uang saya yang seyogianya adalah membangun 29 kilometer waktu itu, *nah* ini, Pak.

Kemudian Pak Bob, ini mengenai irigasi gantung *loh* yang ada di Rawa Jitu. Ini sampai sekarang ini, belum beres ya walaupun pelaksanaannya dilaksanakan, tapi kelihatannya lambat sekali, irigasi gantung, enak ngelihatnya orang. Nah, ini harapan saya adalah supaya ada bisa diperhatikan.

Kemudian tadi juga ada ekspos, Pak Menteri, mengenai stadion. Stadion di kabupaten kelahiran saya itu, dibangun tahun '84, jadi sudah remuk. Nah, oleh karena itu, mohon dicatatlah. Soal berhasil atau enggaknya, kalau saya lihat Bapak itu nulis, saya sudah banggalah, ini mohon dicatat kalau ada kemungkinan bisa direnovasi. Saya rasa seperti itu, takut saya ada kesalahan, tadi yang saya bilang, karena Pak Menteri kita sekarang ini sudah ada ilmu seperti itu, ngeri saya.

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, Oh, masih ada barang beginian?

Silakan, Pak, silakan, kayaknya kalau Pak Tamanuri ini obatnya mudah, pokok liat beliau ngomong, pura-pura *aja nyatet*, selesai itu ngomongnya.

Silakan, silakan.
Ya, baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Bu, Bu Sri, silakan Bu Sri.

F-NASDEM (H. SRI WAHYUNI, S.SOS.):

Ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Makasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Ketua, dan
Pimpinan Komisi V, beserta
Seluruh Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri,
Pak Dirjen,
Pak Ka.balai, dan
semua jajaran yang hadir di sini,

Selamat berpuasa.

Yang pertama, saya langsung saja. Yang pertama saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran atas kinerja selama ini dan mendapatkan WTP lagi, teruslah berkarya dengan baik.

Selanjutnya untuk program 2024, sama dengan teman-teman yang lain, untuk segera ditentukan kuotanya dan segera di SK-kan Pak Menteri agar supaya program segera dapat dilaksanakan.

Untuk kerja sama selama ini dengan Kementerian PUPR, terutama Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Ka.balai, kalau Pak siapa tadi, beliau menyampaikan Ka.balainya kurang baik atau bagaimana, tetapi kalau di Dapil saya *alhamdulillah* dari Pak menteri, Pak Dirjen, dan terutama *nih* Ka.balai- Ka.balai ini baik-baik semua, baik semua, dan komunikatif sekali.

Saya sering di-WA, kalau terkait apa saja yang menyangkut program yang di Dapil saya. Jadi saya heran juga kalau ada Ka.balai yang dikatakan Pak, siapa tadi? Pak Djenri tadi, *kok* seperti itu. Semoga ke depannya tidak ada lagi Ka.balai-Ka.balai yang seperti itu. Kalau bisa Ka.balai-nya seperti yang di Dapil saya lah, baik-baik semua.

Kemudian, atas nama pribadi dan juga atas nama masyarakat dari Dapil VII Jawa Timur, Pak Menteri, kami mengucapkan terima kasih atas semua program yang sudah terlaksana di Dapil VII Jawa Timur, terutama jembatan gantung, Pak Menteri. Ini ada 4 jembatan gantung yang besar di Dapil saya. Itu ada yang terbaru ini jembatan yang paling gagah ini di, di Dapil VII ini, dan itu merupakan sekarang merupakan ikon ya Desa Gedangan dan Desa Wonodadi dimana namanya di Ponorogo. Karena kenapa *kok* gagah? karena berdiri di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah hutan yang... yang apa, menghubungkan dua desa, dan itu bukan hanya sebagai jembatan tetapi sekarang menjadi... menjadi apa namanya, tempat wisata baru.

Nah, dengan adanya wisata baru, masyarakat setempat atau di sekitar situ rekreasinya ke situ, sehingga karena ada apa namanya, ada pengunjung, otomatis ada yang berjualan. Nah, itu menciptakan... menciptakan kegiatan perekonomian yang baru. Jadi sangat membantu masyarakat yang ada di desa tersebut.

Selanjutnya, Pak Menteri, mengenai terkait perservasi jalan nasional, juga sudah terlaksana di beberapa titik di Dapil saya, dan itu sangat-sangat membantu dan sudah dinikmati oleh masyarakat di Dapil saya, Pak Menteri.

Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih dan jalannya sangat bagus, mulus, lebar, aspalnya belum ada yang bolong seperti yang disampaikan Pak Djenri *kok* tadi sepertinya ada jalan-jalan bolong, tapi di Dapil saya, *alhamdulillah*, pengerjaannya, pekerjaannya bagus, jadi saya ucapkan terima kasih.

Kemudian, saya rasa itu, itu saja, Pak Ketua, Pak Menteri dan jajaran yang bisa saya sampaikan.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Terima kasih, Bu Sri.

Pak Willem, silakan.

F-PD (WILLEM WANDIK):

Baik.

Pak Ketua, dari saya langsung saja terkait dengan pelaksanaan program kerja untuk tahun anggaran 2024. Pertama, terkait berdasarkan pagu akhir Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2024, terlihat di sini sebesar 159 triliun, dimana terdapat anggaran belanja barang dan modal sebesar 39 triliun dengan pelaksanaan melalui non tender.

Nah, ini seperti untuk pembayaran tunggakan, eskalasi, dan juga P3TGAI, OP irigasi dan rawa, dan juga revitalisasi drainase, pembangunan sanitasi MCK Ponpes, dan penanganan bencana dan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Ini mohon diperhatikan, mohon diperhatikan non tender ini karena seringkali kita temukan yang diatur ketat melalui tender saja seringkali ditemukan adanya masalah. Oleh karena itu, kiranya diperhatikan baik supaya tidak terjadi permasalahan.

Dan yang berikut, demikian juga perlu diperhatikan kembali kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontraktual, jangan sampai terjadi keterlambatan proses lelangnya karena tahun anggaran 2024 ini merupakan akhir tahun implementasi RPJMN untuk 2019-2024.

Yang berikut demikian juga untuk alokasi anggaran kegiatan tenaga. Kegiatan alokasi anggaran untuk kegiatan dengan pola padat karya tunai tahun 2024 sebesar 7,22 triliun dengan rencana serapan tenaga kerja sebanyak 297.000 orang. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa usulan dari Anggota Komisi V DPR RI belum diakomodir untuk kegiatan pola padat kerja tunai tahun anggaran 2024 ini. Oleh karena itu, perlu juga ada penjelasan pada kesempatan ini.

Dan terakhir, terkait dengan peningkatan jalan di ruas jalan nasional di Papua Pegunungan yang menghubungkan berapa kabupaten di sana hingga hampir belasan tahun belakangan ini, tidak ada upaya-upaya peningkatan jalan sehingga banyak jalan yang hancur dan juga sangat mempengaruhi mobilitasi masyarakat dan juga arus barang dan jasa di wilayah Papua Pegunungan yang menghubungkan tol Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dan juga Mamberamo Tengah, Tolikara, dan juga Puncak Jaya, dan juga Lani Jaya. Hampir 4 kabupaten ini memang, hampir belasan tahun jalannya rusak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kalau Balai Jalan Papua ada, kiranya bisa menjadi atensi dan bisa diperhatikan karena jalan sepanjang ini, selama ini memang jalan memang rusak parah jadi kiranya diberikan atensi.

Sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima Kasih, Pak Willem.

Baik.

Selanjutnya Pak Robert, silakan.

Oh Bu Cen, Iya, Oh Pak Boy juga.

Silakan Bu Cen, biasa bu Cen singkat, silakan Bu Cen.

F-PG (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang Saya hormati Pimpinan,
Teman-teman Anggota Komisi V,
Yang Saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran,
ada Pak Dirjen,

Pak Menteri, saya mengucapkan terima kasih di 2024, krematorium di Batam bulan depan sudah mulai dikerjakan, juga penanganan banjir Sri Katon di Tanjung Pinang bulan depan juga dikerjakan. Kesempatan ini, saya ingin menyampaikan, Pak Menteri, ada beberapa bendung di Kepri yang sudah dibangun, tapi tidak *eh* tidak dapat dimanfaatkan karena anggaran pengerjaan pipa belum dianggarkan.

Jadi ada di Bendung DAS Kawal di Bintan, ada Sebayar dan Sei Gong. Jadi kalau udah dibangun *enggak* ada anggaran pemipaan akhirnya

terbengkalai. Mungkin itu bisa menjadi masukan ke Pak Menteri agar ada penganggaran pendanaan untuk pemipaan.

Kemarin juga saya mengajukan, Pak Menteri, gedung keuskupan untuk Katolik. Kira-kira ada titik terang atau titik gelap, Pak Menteri? Sekarang masih abu-abu, ya Pak Menteri ya, dan Pak Menteri kan sudah janji sama saya. Mudah-mudahan di 2024 dapat direalisasikan karena itu kan *disupport* oleh Pak Ketua saya, Pak Lasarus, ya, Pak Menteri, ya.

Mungkin itu aja dari saya.

Terima kasih. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ini nembaknya kemari gratis lagi, Bu Cen ini jago ilmu pemasarannya ini, Pak Menteri.

Baik.

Pak Boy silakan.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Ya.

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua dan Pimpinan yang saya hormati,
Bapak Menteri beserta jajaran,

Yang pertama-tama, Pak, saya ingin menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Syarif Abdullah, Pak, berkaitan masalah kemacetan yang terjadi di Kapuas 2, yang baru-baru ini Bapak yang meresmikan bersama Bapak Presiden kemarin. Jadi kemacetan itu menurut saya tidak mungkin bisa dihindarkan, Pak.

Jadi cara mengurainya mau tidak mau dari Tanjung Raya 1 ke Tanjung Raya 2 itu harus ada *flyover*, Pak, karena antara jembatan dengan lampu merah itu terlalu dekat, barangkali enggak sampai 100 meter. Sementara kemacetan yang sangat tinggi itu antara dari Tanjung Raya 1 ke Tanjung Raya 2 itu yang membuat macet itu sampai mengantainya orang di atas jembatan Kapuas 2, itu satu, Pak.

Yang kedua, Pak, berkaitan dengan Inpres, saya ucapkan terima kasih. Di daerah saya, Inpresnya sudah dibangun dan *Insyah Allah* mudah-mudahan

di 2024 ini dilanjutkan, Pak, mulai dari Sungai Tengar ke Kecamatan Pesaguan atau Matan Hilir Selatan. Jadi harapan saya, tidak... jangan sampe berhenti, Pak. Lanjutkan pekerjaannya, karena nanti akan sia-sia. Bagus dari Kendawangan ke Sungai Tengar-nya, tetapi Sungai Tengar ke Pesaguan-nya hancur lebur lagi ya, percuma apa yang sudah kita lakukan.

Yang ketiga, Pak, yang ketiga, saya minta pembangunan pipa yang di Kecamatan Kendawangan terhadap air bersih, itu kan tahun 2022 sudah dibangun, Pak, pipa induk yang dibangun dari sumber air kepada pipa induk yang dialirkan di seluruh Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, itu sudah 2 tahun, tetapi ke rumah-rumahnya belum, Pak. Jadi saking kuatnya tekanan air itu sampai-sampai pipa itu biasa jebol, Pak, jebol, karena belum dialirkan ke rumah-rumah.

Kemudian, Pak, yang terakhir, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa Bapak sangat *concern* terhadap berkaitan dengan masalah pencalonan kami di 2024 kemarin, artinya Bapak sangat mendukung dan Bapak berharap semoga kami-kami ini di Komisi V ini harapannya agakterpilih kembali sebagai Anggota DPR RI.

Modal jualan kami pada waktu itu adalah janji, apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan padat karya, Pak. Jadi pada saat kami berkampanye, sesuai dengan harapan kami dan Bapak menyetujui bahkan Bapak menyatakan SK berkaitan dengan padat karya ini akan dikeluarkan terlebih dahulu, dengan harapan kami bisa menjual kepada masyarakat dan berjanji agar kami dipilih kembali sebagai Anggota DPR RI dan *alhamdulillah*, Pak, kami terpilih dengan apa yang Bapak sampaikan ide-ide itu, kami terpilih kami sampaikan bahwa *insyaallah* Menteri PU akan memberikan lagi bantuan BSPS, bantuan P3TGAI, Sandes, dan sebagainya.

Jadi harapan kami, agar janji kami ini bisa kami laksanakan agar tidak berdosa buat kita semua, saya harap hari ini Bapak berikan ketegasan kepada kami berkaitan dengan masalah padat karya, dan hasilnya Pak, manfaatnya sangat luar biasa untuk kami maupun untuk masyarakat apa yang sudah diprogramkan PUPR.

Saya pikir itu, Ketua.

Terima kasih, Pak.

*Billahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima Kasih, Pak Boy.

Jadi Pak Basuki ini hebat, Pak Boy ya, menyelamatkan infrastruktur dan menyelamatkan nasib politisi. Iyalah, ya Pak Boy ya, itu diakui oleh semua Komisi V ini walaupun masih ada juga yang tidak selamat, Pak Menteri.

Ya, baik dari meja Anggota sudah selesai, sekarang ke meja Pimpinan

Saya persilakan Pak Robert dulu.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Baik.

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Saudara Menteri PUPR dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Saya, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, di-stress-kan oleh Saudara saya, Pak Boy, tadi terakhir. Saya kira itu yang menjadi komitmen kita dengan Saudara Menteri terakhir sebelum kita maju di dalam medan pertempuran kemarin, Pak Menteri, dan itu kami lakukan itu dan responnya sangat baik. Untuk itu, harapan saya juga pada Saudara Menteri agar komitmen yang sudah kami lakukan bersama di komisi ini, agar bisa kembali lagi seperti 2023.

Memang kemarin saya dihubungi oleh Satker dari perumahan, tetapi saya belum bisa berkoordinasi. Saya minta, saya bilang tunggu dulu, kami akan rapat dengan Saudara Menteri dulu, kami ingin dapat informasi yang jelas, baru kami berkomunikasi.

Karena kalau apa yang disampaikan oleh Satker dari perumahan kemarin, itu jauh sekali, maka kalau itu yang kami realisasi, nanti kami ini akan mendapat hujatan dari masyarakat terutama di daerah kami karena kami sudah mengumpulkan KTP dan kami sesuaikan dengan program yang 2023. Maka itu, kami mohon dengan sangat untuk dapat jawaban yang pasti oleh Saudara Menteri.

Yang berikut ada program yang membuat kami mendapat kendala terhadap mekanisme yang berubah, Pak Menteri. Itu ada program baru, programnya lama, yang sudah kami lakukan yang jalankan di 2023 tapi 2024 ini mekanismenya berubah, berubah, dan itu sangat berpengaruh. Apalagi, kami harus meminta rekomendasi dari pimpinan pemerintah daerah, ya, belum tentu kami semua ini berjalan seiring dengan pemerintah daerah. Sudah begitu, kami masuk di dalam kotak yang sama dengan umum.

Saya kira harus dibagi reguler *tuh* di sana, Anggota Dewan ada di sini, mekanismenya sama tapi kotaknya beda, akhirnya dengan syarat-syarat yang

di luar dari syarat pemerintah daerah itu, saya kira itu. Karena kalau kami masuk di umum, ya kami tidak tahu bagian kami itu dimana *gitu*, iya kan.

Di dalam satu daerah Dapil, saya misalnya, di situ ada kayak dulu kami misalnya dapat 200 yang kami usulkan, ternyata ada 200 ini, itu bisa diisi oleh masyarakat umum, diisi oleh kepala desa, diisi oleh pemerintah daerah, bupati, diisi oleh Anggota Dewan. Di mana porsinya kami?. Ini, ini, ini, ya, jadi itu catatan-catatan penting mungkin teman-teman ini belum menyampaikan.

Jadi saya ingin menyampaikan itu yang membuat kendala kami untuk program yang akan kami laksanakan di dalam 2024 nanti. Jadi mohon nanti jawaban dari Saudara Menteri untuk kami semua.

Yang berikut, saya kira Revisi Undang-Undang Jalan itu adalah hak inisiatif dewan, Pak. Setelah itu selesai, kami berterima kasih, Presiden langsung menanggapi itu dengan membuat satu Inpres Jalan Daerah, dan itu awalnya keluar kami sangat mendapat apresiasi dari daerah. Daerah-daerah mencari kami untuk mohon sebagai mendapat rekomendasi untuk mengusulkan itu, tetapi sekarang yang ada, kami tidak tahu sama sekali jalan daerah ini keluarnya kapan, di mana saja di daerah kami, itu tidak ada sama sekali ya.

Dan menurut hemat kami, melihat bahwa jalan daerah ini hampir ya, kami tidak iri, tapi saya kira yang harusnya mendapat porsi besar itu adalah di luar Pulau Jawa karena Jawa ini sudah punya infrastruktur yang sudah cukup baik. Tetapi kalau menurut saya, saya melihat bahwa hampir porsinya besar ada di Pulau Jawa, mohon koreksi Pak Menteri, ya. Karena dengan Inpres Jalan Daerah ini, itu semangatnya adalah kami-kami yang di luar Pulau Jawa karena pendapatan daerah kami sangat minim, ya, jadi kami butuhkan itu, tapi kalau daerah-daerah di Pulau Jawa, saya kira pendapatan daerahnya cukup baik.

Jadi ini yang menjadi catatan kami mohon perhatian dari Saudara Menteri untuk bisa, ya, kami mendapat kesempatan untuk bisa mengusulkan lagi Inpres Jalan Daerah ini karena kami tidak tahu dan tadi saya agak melihat teman-teman tadi menyampaikan, Bu Cen sampaikan, bahwa ini proyek di sini sudah mulai apa berarti komunikasinya jalan begitu. Saya tidak tahu Inpres Jalan Daerah kapan selesainya? mulai jalannya kapan? kami tidak tahu itu.

Jadi komunikasi ini juga belum jalan baik, jadi mohon supaya ya, kalau jalan seperti itu ya, saya pasti menyampaikan juga terima kasih, Pak Menteri, karena saya punya jalan sekarang, sudah mulai bangun, sudah selesai, ya. Bagaimana saya mau aspirasi ke Bapak memberikan apa ya bukan apresiasi untuk Pak Menteri, sedangkan saya tidak tahu data, saya usulkan kapan jalannya, tidak pernah berkomunikasi dengan kami.

Saya kira kalau itu berkomunikasi, kami tahu diri kami akan menyampaikan juga apresiasi kepada Pak Menteri dan jajaran. Jadi mohon ini

untuk catatan kepada kepala-kepala balai kami di daerah kami untuk bisa berkomunikasi untuk kami berikan apresiasi. Bukan cuma mengusulkan saja terus kami diam, berarti kami tidak tahu berterima kasih, gitu itu. Jadi bukan kami tidak mau berterimakasih, karena memang tidak diberikan apa informasi kepada kami seperti itu.

Yang berikut, kemarin saya di Jayapura karena di Dapil kami menghadapi Pemilu kemarin, saya cukup lama di sana. Saya melihat di daerah jembatan Merah itu, Holtekamp, bagaimana abrasinya begitu hebat sekali Pak Menteri ya. Dan saya kira di BS, PWS ada keluar apa, pengaman pantai Ciberi itu, itu kan di ujungnya, ya, tapi saya kemarin tanya kenapa belum dilakukan itu masih berkendala, karena hutan lindung ya. Izin dari apa Menteri KLH itu belum keluar, ya.

Jadi kalau bisa ya, kalau jangan sampai anggaran itu hilang kalau belum itu digeser saja ke sini ya kan, karena itu masih satu areal sebenarnya ya. Saya tidak sampai 2 minggu di situ. Saya main ke pantai itu, mungkin sudah tergerus sekitar hampir 5 meter, pohon-pohon kelapa yang di situ sudah tumbang semuanya, padahal saya biasa jalan pagi di situ pantai itu. Saya pun kaget *kok* bisa sampai secepat itu. Nah, saya kira kalau kita tidak cepat membuat pengaman pantai di sana, 5 tahun ke depan mungkin sudah sampai di jalan itu ya jalan Holtekamp. Jadi ini mungkin jadi catatan untuk Pak Menteri dan jajaran untuk bisa melihat itu agar kalau memang itu masih lama, Pantai Ciberi itu bisa digeser saja karena itu adalah satu garis pantai.

Yang berikut, ini tadi Bu Sri ngomong soal jembatan gantung. Saya sejak sampai saat ini, di sini jembatan gantung saya satu pun belum selesai ya, Pak Dirjen Bina Marga, satu pun jembatan gantung di saya belum selesai. Iya, sudah sekian lama, kemarin ada satu yang sudah dibangun di Waropen tapi mangkrak tidak selesai, ditinggalin itu, itu. Nah, ada dua lagi yang saya minta, supaya itu agak jauh di Waropen mungkin, saya pindahkan ke ke Pulau Yapen mungkin lebih supaya bisa lebih cepat selesai transportasi apa lebih baik, sampai sekarang mungkin kemarin baru masuk di proses *e-katalognya* katanya. Jadi mohon menjadi perhatian agar kalau bisa dua ini bisa selesai, ya, karena sudah *nunggu* terus.

Saya kasih di pegunungan memang kendala karena situasi keamanan ya, makanya saya oke kita turunkan ke bawah, jadi supaya saya juga bisa meresmikan jembatan gantung begitu, Pak Menteri. Jangan jadi gantung diri terus saya *nih* Pak ya, ya, ya.

Yang berikut, saya, Pak Menteri, saya ini ada punya satu hutang, Pak Menteri. Saya pernah SMS Bapak, saya masih catat hari Selasa, 19 Desember jam 7 malam, saya minta waktu untuk ketemu Bapak, Desember 2023, saya baru pulang dari Papua, Pak, tidak sampai 2 minggu kemudian, Kepala Balai Perumahan saya meninggal. Saya *pengin* menyampaikan pesanbeliau kepada Bapak, jadi saya masih punya hutang sebenarnya, beliau meninggal, kasihan, kepala balai saya.

Pesan beliau kepada saya untuk ngomong ke Bapak, beliau *pengin* pesan apa, Pak, beliau Sulawesi, iya dan dibawa makam ke Sulawesi."Pak Robert, tolong sampaikan Pak Menteri biar saya pensiun di kampung saya saja, saya minta pindah ke sana." Ternyata beliau *pengin* pulang ke sana terus iya itu pesan beliau kepada saya, ada saksinya, bukan saya sendiri waktu duduk sama beliau itu ya beliau pesan begitu. Ya, jadi ya hutangnya saya sudah sampaikan Pak Menteri, tapi beliau sudah pergi, tidak apa-apa.

Yang berikut, Pak Menteri memang ada bermasalah di sana kepala balai dengan Satkernya. Itulah membuat beliau pindah daripada itu saya biar saya pulang kampung saja sampai pensiun di sana begitu. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Setjen, dan itu ternyata Satkernya naik jadi kepala balai dan PPK yang kenal yang dekat sama saya, komunikasi sama saya semua dipindahkan dikeluarkan dan sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan Kepala Balai Perumahan yang baru. Pak Iwan, mohon maaf Pak Iwan, ya pernah saya sampaikan Pak Iwan kepada Bapak bahwa selalu saya berkendala dengan kepala balai itu dan beliau sampaikan kepada teman-teman balai itu, tidak usah komunikasi sama Pak Robert, Pak Robert belum tentu jadi Anggota Dewan kembali dan sampai saat ini beliau tidak pernah berkomunikasi dengan saya, begitu.

Ini saya kira sebagai mitra, kami minta kepada Pak Menteri untuk bisa menjaga hubungan kami ini dengan..., karena kami di daerah pasti dengan balai, kami bicara di sini dengan Pak Menteri, tapi di daerah kami akan berurusan dengan balai kalau bagaimana di daerah kami tidak jalan bersama ya pasti kami di sini akan menjadi kendala kepada Pak Menteri. Untuk itu, mohon sekali lagi untuk bisa menjadi atensi Pak Menteri untuk khusus Balai Perumahan saya di sana ya.

Yang berikut, Pak Menteri, kita bicara IKN ini memang mau tidak mau kita harus karena ini sudah ada, Undang-Undang tentang IKN, Ibukota Negara sudah berpindah dari DKI. Kemarin kami sudah putuskan tentang Undang-Undang Khusus Jakarta berarti sudah selesai. Saya cuma ingatkan, Pak Menteri bisa sampaikan Bapak Presiden agar pelantikan Presiden terpilih nanti apakah di Jakarta apakah di IKN? karena masih tertulis itu dilantik di ibukota negara.

Ibukota negara itu sekarang tidak lagi Jakarta. Siap enggak IKN itu untuk melantik Presiden kita? Bukan di sini loh. Tolong, sebagai ketua fraksi saya kemari melihat, saya sampaikan itu, untuk karena Bapak juga dekat sama Presiden, tolong melihat ini kita bangun, apakah siap untuk nanti digunakan karena undang-undangnya sudah ada. Di dalam undang-undang kita yang masih berlaku itu bunyinya:"Presiden dan Wakil Presiden dilantik di ibu kota negara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia". Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sudah berpindah. Itu ingin saya sampaikan.

Itu saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan.

Saya kembalikan ke Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Makasih, Pak Robert.

Pak Andi Darmawan Aras, silakan.

F-GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Siap, Pak.
Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran yang kami hormati,

Saya singkat-singkat aja, Pak, karena hampir sebagian besar sudah disampaikan oleh teman-teman Anggota tadi. Ya, tentu saya juga wajib mengapresiasi pencapaian wajib WTP dari 2019 sampai 2023 secara berturut-turut dan ada sedikit hal yang ingin saya mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri tentang temuan berulang yang ini yang mana terdapat kesalahan penganggaran belanja modal yang juga kelihatannya cukup tinggi, hampir 1 triliun. Ini kalau boleh kami dapat penjelasan, kesalahan-kesalahan yang berulang ini seperti apa sehingga kemudian setiap tahunnya tetap ada temuan itu. Terus langkah-langkah apa yang kira-kira Pak Dirjen lakukan untuk bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang berulang tersebut.

Kemudian, pada kesempatan ini juga sama seperti teman-teman yang lain, kami berterima kasih atas program-program kepadat-karyaan yang Bapak berikan kepada seluruh teman Komisi V. Sebagian besar dari kami bisa kembali berada di ruangan ini lagi karena program-program yang Bapak berikan kepada kami. Dan seperti yang tadi disampaikan hasil kampanye kita ini memang banyak hutang jadinya, Pak Menteri, sehingga harapannya kita berharap bahwa apa yang sudah kami janjikan kepada masyarakat ini bisa kami apa namanya tepati.

Kemudian, menyangkut masalah jalan daerah. Memang benar tadi bahwa alokasi Inpres Janda ini, Pak, jalan daerah ini, memang menjadi sangat prioritas *eh* apa namanya menjadi sangat dibutuhkan hampir semua kabupaten, kota terutama memang yang di daerah Jawa. Karena kami memang kemampuan APBD seperti yang disampaikan oleh Pak Robert tadi di daerah kami kemampuan APBD masing-masing kabupaten, kota itu masih

sangat rendah sehingga memang dibutuhkan intervensi, apa, dalam hal ini Kementerian PUPR dalam bentuk investasi daerah tersebut.

Namun, ada hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Pada tahun yang lalu total maksimal jumlah anggaran yang dimasukkan dalam satu kabupaten itu, sebelumnya 100 miliar, namun kemudian kami mendengar ada pengurangan lagi sebesar 50 miliar. Cuman saya ingin menyarankan ke Bapak bahwa sebaiknya pengalokasian anggaran itu tidak dibagi merata tetapi sebaiknya secara proporsional ya.

Kami mendengar jawaban-jawaban bahwa setiap kabupaten hanya maksimal 50 miliar, nah tadinya maksimal 100 miliar terus kemudian berubah menjadi 50 miliar. Nah, ini yang kita harapkan seharusnya berdasar kepada luasan wilayah atau populasi ataupun jumlah jalan daerah yang ada di setiap kabupaten, kota. Itu masukan dari kami dan mudah-mudahan sudah seperti itu karena banyak, Pak, dengan alasan pemerataan di seluruh Indonesia ini, sehingga kemudian dibuat pengalokasian itu dengan kondisi seperti itu. Tapi kami harapkan bisa lebih proporsional karena contoh di kabupaten kami, di Dapil kami, seperti Kabupaten Bone jumlah penduduknya sangat besar wilayahnya cukup luas, tetapi kalau kemudian alokasi anggarannya disamakan dengan kabupaten yang lebih kecil, yang cuma penduduknya cuma di bawah 100.000, dan luasan wilayah kecil, saya kira asas keadilannya enggak tercapai atau pemerataan itu malah tidak tercapai.

Kemudian menyangkut masalah program pompanisasi Kementan ini enggak ada hubungannya sih Pak, sebenarnya dengan Pak Menteri. Cuman saya ingin menyampaikan pada saat El Nino yang lalu hampir sebagian besar sungai-sungai kita yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, itu mengalami apa kekeringan, bahkan cenderung ada yang tinggal seperti kelihatan kayak parit.

Nah, kalau program pompanisasi ini kalau saya dengar dari Kementan dari Pak Mentan itu 6 triliun yang akan dialokasikan, apakah kemudian menurut Pak Menteri PUPR, program ini dalam hal ini dilihat sumber daya air, apakah tidak lebih ke wilayah revitalisasi sungai atau normalisasi sungai kita sendiri dulu atau pembuatan irigasi yang lebih dioptimalkan dibandingkan kemudian pengarahannya pompanisasi yang kurang lebih 6 triliun yang saya kira juga cukup besar kalau itu dialokasikan kepada pembangunan irigasi ataupun normalisasi sungai yang ada.

Karena apa yang mau dipompa, Pak, kalau airnya *enggak* ada nanti, kan mungkin itu gambaran ya. Kalau musim sekarang pompanisasi mungkin *oke* pada saat hujan, tapi di saat EL Nino airnya kering, saya kira mubazirlah 6 triliun itu. Mending karena kemarin Bapak banyak membantu Balai Sumber Daya Air, di Balai Air di Sulsel kemarin sempat membantu *crash* program, sungai-sungai yang sudah kering itu dibantu, Pak, masyarakatnya. *Alhamdulillah*, ini masuk dalam konteks pengendalian bencana ya itu yang kering-kering itu bisa digalikan *alhamdulillah* masyarakat kita, petani kita masih mendapatkan air ya.

Kemudian, Pak, menyangkut masalah PSN. Ini kan kemarin *Mamminasata* itu masuk dalam PSN-nya kita, namun sekarang dikeluarkan. Harapannya, Pak, kondisi jalan Makassar-Marus ini sudah semakin mendesak bahkan sampai ke Bone. *Alhamdulillah* sekarang Bone ini kan ada apa namanya, perbaikan-perbaikan di wilayah-wilayah yang sering macet. Namun kemudian kita berharap mungkin dari Kementerian PUPR dalam hal ini BPJT ada semacam perencanaan untuk pembangunan tol Makassar- Marus, bahkan sampai ke Bone karena ini menghubungkan provinsi lain, Pak, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan.

Dan yang terakhir, kemarin kami melakukan kunjungan kerja di Lampung. kami melihat indikasi kejadian yang ada di Provinsi Jambi akan sedikit, sudah mulai merambah ke Provinsi Lampung. Ini menyangkut masalah mobil-mobil *over dimension overload*. Saya meminta kemarin kepada pengelola BPJT ataupun kepala balai agar supaya lebih mempertegas penggunaan jalan-jalan nasional kita ataupun jalan jalan tol kita agar supaya mobil-mobil tambang ini tidak lagi menggunakan fasilitas kita yang mana kejadian ini sudah terjadi mulai dari Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan sekarang saya lihat sudah mulai berangsur-angsur masuk ke Provinsi Lampung lagi.

Mudah-mudahan ada apa namanya, ada hal yang bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR, bagaimana agar supaya penggunaan mobil yang *auto over dimension over load* ini bisa betul-betul direduksi. Saya juga sudah menyampaikan, Pak, kepada pihak Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Balai Darat, agar lebih mengoptimalkan fungsi jembatan timbang yang ada di provinsi tersebut tetapi saya kira kalau misalkan Kementerian PUPR dalam hal ini Pak Dirjen juga bisa menggunakan Undang-Undang Jalan kita, agar supaya mobil-mobil ODOL ini, apalagi pengangkut masalah tambang, ini betul-betul bisa kita tertibkan.

Mohon maaf satu lagi, Pak Menteri, masalah pembangunan Bendungan Jenelata, Jenelata ya, kalau enggak salah di Provinsi Selatan itu, kalau saya tidak salah adalah *loan* China dan dilaksanakan oleh konsorsium atau KSO dengan BUMN-BUMN kita. Kita berharap ada *multiple* efek terhadap masyarakat kita di sana, terutama pengusaha-pengusaha lokal. Mohon agar supaya ada pemberdayaan pengusaha lokal tidak dalam kondisi subkon, tetapi betul-betul terlibat dalam pembangunan di bendungan tersebut, agar supaya *multiple* efek yang bisa kita rasakan bisa lebih maksimal.

Mungkin itu, Pak Ketua.

Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terimakasih, Pak Iwan.

Pak Ridwan, Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (IR. RIDWAN BAE):

Terima Kasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Komisi V yang terhormat,
Yang saya hormati Pak Menteri dengan seluruh jajarannya,

Saya langsung saja dalam persoalan Dapil saja, Pak. Saya terima kasih kepada Pak Menteri karena Pelosika sudah mulai akan dibangun pada tahun 2024 ini. Terima kasih, Pak Menteri. Itu sangat didambakan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara yang tidak terlalu jauh tempatnya dengan Ameroro.

Yang kedua, Pak Menteri, juga Pak Dirjen Sumber Daya Air ya, Pak Bob ini. Itu di... di Sulawesi Tenggara itu 2 pulau, Pak, satu daratan, satu kepulauan, nah di kepulauan bendungan hampir belum ada itu, Pak. Nah, maksud saya kalau bisa, sudah pernah saya turun sama Balai Kepala Balai BWS di sana, ada potensi 3000 lebih di Kabupaten Muna. 3000 lebih sawahnya, pencetakan sawahnya hanya membutuhkan bendungan, bendung dia bukan bendungan tapi bendung. Mungkin itu anggaran perencanaan awal itu, Pak Menteri, kurang lebih 3 sampai 5 miliar katanya, itu saya dengar dari yang, mungkin saya minta barangkali melalui Pak Menteri, Pak Dirjen barangkali untuk bisa dianggarkan tahun ini supaya tahun 2025 bisa kita masuk ke fisik. Iya, itu kira-kira Pak Menteri.

Yang berikutnya, Pak Menteri sudah ada surat-persuratan saya juga saya menginformasikan bahwa, ada dua jalan yang sangat berat di Sulawesi Tenggara itu, yaitu jalan provinsi. Mungkin apa namanya, Inpres Jalan Daerah bisa menjadi prioritas di sana untuk tahap kedua yaitu di Kabupaten Buton Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton. Itu Pak Dirjen ada di situ, kemudian juga di Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, berhubungan langsung juga dengan Rate-rate, ibukota Kabupaten Kolaka Timur, dua wilayah itu yang sangat parah Pak Menteri, jalanannya.

Kemudian yang berikutnya Pak Menteri adalah baru-baru ini di Kota Kendari banjir dan di sana saya turun sama para balai Bapak yang ada di sana, semua kita turun ke lapangan dan partisipasi para kepala balai sangat bagus, Pak. Di Cipta Karya itu, mereka turunkan semua peralatan-peralatan yang ada membantu di jalanan juga ada, di sumber daya air juga turun di sana.

Cuma dana-dana apa, tanggap daruratnya terlalu kecil mungkin itu karena satu titik itu 500 juta. Nah, kalau di sana karena baru-baru terjadi tiga-empat titik terjadi kecelakaan itu, Pak. Itu barangkali perlu pertimbangan kalau

misalnya ada kelebihan keuangan untuk segera ditingkatkan itu dana tangkap daruratnya sehingga biar mereka bisa bekerja membantu masyarakat yang ada di sana.

Hanya itu Pak Menteri, terima kasih juga sebab saya juga terpilih gara-gara peran Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Itu pengakuan yang jujur ya, Pak Ridwan ya.

Baik, saya terakhir sedikit saja, Pak Menteri.

Terima kasih juga Pak Menteri, kemarin sudah bersama-sama kita ke Kalbar meresmikan Bandara Singkawang dan jembatan duplikasi Kapuas ya. Itu bukti komitmen Pak Menteri untuk infrastruktur di Kalimantan. Saya ada usul, Pak Menteri, terkait dengan Inpres Jalan Daerah, mengingat terbatasnya dana dan besarnya permintaan.

Itu euforia masyarakat luar biasa terhadap program ini Pak Menteri, hanya mungkin menurut saya sejatinya Inpres Jalan Daerah ini kan untuk mengurangi apa namanya ya kerusakan jalan di daerah sebetulnya. Kami melihat, Pak Menteri, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi. Harusnya, kita melihat daerah mana yang betul-betul daerah jalan daerahnya banyak rusak dan perlu perhatian dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, mengentaskan kemiskinan dan seterusnya.

Ya, memang kalau itu kacamata kita hari ini, mungkin kita perlu evaluasi ulang karena terbatasnya pembiayaan Inpres ini memang menimbulkan persoalan tersendiri. Maka dulu saya ada usul, *gimana* kalau kita ubah saja jalan, kewenangan jalan daerah ini untuk menjadi kewenangan pusat saja karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, tapi ini juga pasti menuai perdebatan karena menyangkut kewenangan.

Lalu seberapa besar anggaran yang harus kita lokasikan untuk jalan daerah? Ini pun juga sulit untuk kita jawab supaya terukur *gitu loh*, supaya ukurannya jelas gitu. Ini kan masih ada istilah nanti, ada anak tiri, ada anak emas yang muncul di pemerintah daerah itu yang keluhan yang disampaikan oleh para kepala daerah ke kami.

Dulu kita coba pakai indikator keuangan daerah dulu dipakai oleh Bappenas ya, sehingga yang pemerintah daerah yang kuat secara sisi keuangan tidak diutamakan dalam konteks Inpres Jalan Daerah, tapi timbul juga banyak persoalan. Ada protes dari banyak daerah juga. Saya rasa ini sisi lain yang harus kita pertimbangkan ke depan dalam konteks Inpres Jalan Daerah ini supaya betul-betul ini tepat sasaran. Kita bisa lihat perbandingan

indeks infrastruktur jalan untuk kabupaten yang sudah bagus, apakah masih harus kita intervensi dalam konteks tanda kutip sama jumlah uangnya dengan daerah yang infrastruktur jalan daerahnya sudah betul-betul hancur, *gitu loh*.

Jadi saya pernah berdiskusi dengan Pak Menteri dulu terkait contoh di Kalimantan, misalnya. Di Kalimantan itu daerahnya daerah kaya bukan daerah miskin dan orangnya juga tidak malas. Hari ini Pak Menteri masih banyak di pedalaman Kalimantan Barat, itu saya ngambil kaca mata Kalimantan Barat. Sekarang kan kelapa sawit sekarang sudah euforia ke mana-mana, Pak. Orang kebun karet ditebang ditanam kelapa sawit dengan harapan ya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hanya masalahnya kelapa sawit ini tidak setahan karet, Pak. Kalau karet itu habis disadap, dia simpan bertahun-tahun pun masih bisa dijual tapi tidak demikian dengankelapa sawit, Pak Menteri. Kelapa sawit dalam 2 hari kalau dia tidak bawa turun apalagi masuk hari ketiga pasti dibuang, Pak. Ini masalah ya, ini menurut saya bagaimana negara hadir untuk pada saat bersamaan rakyat melakukan apa, negara membuat apa, jadi saling melengkapi.

Nah, ini... ini yang kita mau kejar sebetulnya. Di tempat saya, itu jalan daerahnya mungkin 80%, Pak. Kalau kabupaten saya itu, itu 80% itu dalam kondisi rusak. Baru-baru ini saya ada kirim video mungkin, Pak Dirjen, mungkin sudah terima juga ya, anak-anak sekolah pulang dari sekolah, Pak, dorong motor, pakai seragam, pakai kerudung, sampai kerudungnya pun lumpur, semua, masih ada, Pak, di tempat kita yang seperti itu, dan jalan itu dilewati setiap hari. Asal mereka pergi sekolah lewat situ, tapi kalau hujan ya seperti itu juga yang terjadi dan banyak sekali ruas-ruas kalam seperti itu. Jadimenurut saya memang harus ada kriteria yang kita bikin ke depan sehingga Inpres Jalan Daerah ini, betul-betul tidak menjadi politis tapi betul-betul objektif menyelesaikan jalan daerah.

Ini usul hanya formulasinya, menurut saya yang harus kita cari yang pas bahkan saya kalau kita setuju kita revisi Undang-Undang jalan itu supaya ukur intervensi pusat terhadap jalan daerah itu betul-betul terukur dan pemerintah pusat bisa bikin *roadmap*, Pak, misalnya dalam waktu sekian tahun, jalan daerah ini pasti akan bagus seperti kita menggarap jalan nasional. Jalan nasional ini kan karena terukur kerja kementerian ya ditangani oleh kementerian yang betul-betul juga orangnya memang ahli di bidangnya, Pak.

Saya masih menemukan *loh* Pak, Kepala Dinas PU yang bukan orang Teknik Sipil Pak, ada *loh*, Pak, pemerintah daerah itu. Bapak bayangkan ada Kepala Dinas PU yang bukan orang Teknik Sipil, Pak. Bagaimana kita bicara, kita, standar, tentang standar jalan. Jalan ini kan harus ada standar kan, Pak Dirjen, untuk jalan daerah ini bisa dilewati kendaraan dengan tonase sekian misalnya, sehingga jalan ini akan ketika kita intervensi dengan uang, umur jalan *tuh* nanti sekian terukur. Maka jalan nasional itu kenapa umurnya bagus, Pak? karena terukur dari sisi teknis, perencanaan, dan seterusnya semua tertata dengan baik.

Apakah jalan daerah demikian? tidak, Pak, saya bilang tidak, kita belum sampai ke sana untuk jalan daerah. Nah, apakah kita biarkan terus *nih*, karena kita merasa tidak nyaman dengan soal kewenangan misalnya. Ini sayarasa ini diskusi yang panjang ini saling menjaga perasaan. Tapi di satu sisi rakyat, Pak, terus tertekan oleh situasi ini. Seperti saya bilang tadi di tempat kami sana sudah banyak karet ditebang, orang ganti kelapa sawit karena karet sudah tidak ada harga, Pak. Orang *noreh* apa orang sana bilang, *noreh* ya, *ngaret* getah itu, Pak, tidak nutup biayanya, lebih untung mereka tanam kelapa sawit. Cuma resikonya itu tadi, kalau karet mereka taro, tunggu jalan kering dulu baru jual, masih bisa, tapi sawit *ndak* bisa, tidak bisa, Pak.

Saya rasa teman-teman dari PU enggak perlu saya cerita panjang ke Pak Menteri dan jajaran Dirjen, dan Direktur di Kementerian PUPR, teman-teman balai semua paham soal ini karena mereka terkait jalan daerah ini sudah mulai keluar-masuk ke jalan-jalan daerah dalam melakukan survei dan seterusnya. Saya rasa ini PR yang perlu kita kerjakan ke depan. Mudah-mudahan di pemerintahan yang akan datang ya, Pak Iwan ya, Dinda, ya, ya walaupun urusan MK belum selesai ya, tapi ya fakta hari ini kita harus akui situasinya seperti ya.

Kita berharap mudah-mudahan Pak Basuki masih berkenan jadi menteri kalau Gerindra mau melamarnya ya, dengan senang hati kita di sini dengan Pak Bas, karena Pak Bas sudah paham. Apalagi saya lihat Pak Bas ya, ada *sih* yang gagal di sini tapi masih banyak yang berhasil ya komposisi *the winning team* Komisi V ini, saya lihat masih masih sebagian besar adalah teman-teman yang periode 2019-2024 masih. Saya tanya-tanya ada yang mau pindah komisi *ndak*? *ndak* ada yang mau pindah komisi di sini, kelihatannya masih pengen bertahan semua ya.

Hanya mungkin komposisi Pimpinan ini akan berubah, Pak Menteri, ya seiring *eh* nanti lobi-lobi lah ya di level para *penggede* partai ini karena biasanya V ini salah satu komisi yang biasanya menarik bagi partai politik untuk menaruh kader terbaiknya di sini, Pak. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua soal ke Dapil, Pak Menteri, saya berharap jalan Erak batas Kaltim, dulu kita pernah pergi ke sana, Pak. Itu ada 7 kilometer kita ngejar ke daerah batas sana itu dulu sudah kondisinya, kalau itu cepat ditangani menurut saya karena sudah peningkatan, kalau kita aspal Pak Edi Rahadian itu jadi tidak *mubazir* juga materialnya, Pak, tapi kalau kita tidak aspal mungkin nanti ini juga materialnya akan lama-lama tergerus air hilang lagi. Jadi saya pikir ini kita aspal saja 7 kilo ini, kalau bisa 2024 ini.

Kemudian jembatannya, Pak sekalian kita tangani ya, beriringan sehingga kita nyampai ke Tanjung lokang Pak ya, kalau sudah nyampai di Tanjung Lokang, tahan dulu di situ. Ya, silakan nanti mungkin program berikutnya untuk pemerintahan berikutnya lanjutkan menuju ke batas Kaltim ya, apakah nanti kita masih menggunakan pola dulu ya langsung ditangani oleh pihak ketiga atau mungkin minta jasa dari TNI lagi, *monggo* saja silakan ya, yang penting harus ada solusi ini.

Menurut saya kemarin terakhir saya ke sana waktu Pemilu, Pak Menteri, sebelum nyoblos, kemarin saya masih sempat ke daerah batas sana ya karena ada banjir besar tempo hari di atas, Pak, saya khawatir juga jembatan gantung di atas itu ambruk, rupanya aman, Pak. Jadi ketinggian jembatan itu masih aman dari jangkauan air. Saya melihat itu kalau tidak cepat kita tangani, ada kemungkinan material yang sudah disusun dengan baik ini, kalau tidak ditutup dengan aspal nanti rusak lagi.

Kemudian yang terakhir, Pak, di jembatan Melawi di Kota Sintang. Ini jembatan satu-satunya pernah saya sampaikan hanya satu jembatan ini, Pak. Kalau jembatan ini macet, atau mungkin putus, praktis orang menuju ke Sintang, menuju Kapuas Hulu, harus pakai pakai ponton lagi, Pak. Orang bisa naik kapal lagi baru nyeberang ke seberang. Saya pernah diskusi dengan Pak Menteri kemarin waktu kita meresmikan jembatan Kapuas. Pak Menteri punya ide, ya *udah* kita *nggak* usah bikin duplikasi supaya pemukiman itu meluas ya kita bikin aja di sebelahnya lagi atau agak jauh dari sisi situ.

Nah, di Melawi itu bisa, Pak, orang bisa dari Nanga dari Pontianak masuk ke Simpang Pinoh dulu, Pak Dirjen. Dari Simpang Pinoh itu, ada namanya Kecamatan Dedai, Pak. Itu dari situ kita bisa bikin satu jembatan lagi. Jadi orang kalau mau ke Putussibau *ndak* perlu melintasi tengah Kota Sintang, Pak. Jadi dia sudah bisa keluar Kota Sintang, jalannya itu sebelum bandara, Pak, kalau kita menuju ke Melawi itu, ada jalan ke bandara Tebelian Sintang ya, nah dari situ nanti ada jalan ke kiri, Pak, bisa menuju ke Nanga Dedai. Dari situ ada jalan juga, tinggal kita bikin jembatan di situ akhirnya jembatan yang di Kota Sintang ini bisa kita selamatkan. Per hari ini, Pak Menteri, karena saya banyak waktu di sana ya, kalau sudah macet, pasti jam pagi, sore itu macet Pak, dan itu hanya satu saja jembatan, *ndak* ada alternatif lain ya. Saya khawatir kalau itu ada apa-apa dengan jembatan itu jadi persoalan besar karena kita harus menyiapkan angkutan alternatif, karena memang tidak ada lagi jembatan lain. Mau berapa kilo ke ujung pun tidak ada sampai ke Melawi sana baru kita ketemu jembatan Melawi 2 namanya. Ya, jadi itu jauh sekali. Saya rasa ini *urgent* sekali untuk kita perbaiki.

Yang lain-lain saya rasa tadi teman-teman bisik-bisik kepada saya, Pak Menteri, terkait dengan program apa namanya yang bantuan padat karya itu ya, seperti yang dulu pernah kita bahas bersama ya dengan Pak Menteri. Dan tadi Pak Menteri, teman-teman sekalian ya sudah menyampaikan kepada kita bahwa seluruh sisa lelang nanti akan diupayakan untuk dibantu ke program ini ya supaya nanti padat karya ini betul-betul bisa terus membantu masyarakat sebagaimana yang selalu kita lakukan selama ini ya.

Kemudian yang terakhir mungkin soal kriteria, Pak. Contoh seperti P3TGAI itu, Pak Menteri sekarang kan disuruh *upload*, ya, *upload* kemudian memang di sini ada sedikit perlu bagaimana ya ini memang dari sisi teknis tadi saya diskusi juga dengan Pak Dirjen karena ini dipantau juga oleh penegak hukum dan seterusnya ya, itu kita pahami. Hanya mungkin memang

harus dicarikan formulasi yang pas, Pak, sehingga takutnya nanti begini, Pak Menteri, kuota ini kan terbatas, sementara teman-teman juga mungkin ya terkait dengan Pemilu dan seterusnya sudah melakukan survei lapangan, ketemu tokoh masyarakat, melihat layak atau tidaknya lokasi, dan seterusnya.

Sebetulnya sama saja *sih* sebetulnya Pak, ya. Kalau layak, tidak layak juga yang memutuskan kan kementerian karena dilakukan survei ulang, Pak. Jadi usulan nanti disurvei ulang lagi ya, tidak langsung itu usulan itu disetujui, kalau tidak layak kan tidak dibikin, karena nanti jadi temuan. Sebenarnya sama saja tapi ini soal pintu masuknya saja, Pak, misalnya nanti dari pemerintah daerah meng-*upload* hal yang sama misalnya, terus banyak masuk yang di-*upload* oleh pemerintah daerah daripada teman-teman di sini. Tadi Pak Hamka menyampaikan saya seperti ini, saya seperti tadi *gitu* tadi maksudnya Pak Hamka ya.

Jadi yang yang begini ini menurut saya, Pak Menteri, yang harus kita kita luruskan. *Toh*, nanti verifikasi kan tetap di Menteri PU, Pak. Contoh *nih*, BPS yang saya tahu ya. BPS itu kita ngusulkan, itu pun kita minta kepala desa usulkan kemudian foto rumah, KK, KTP, itu pekerjaan kami mungkin, Pak. Bukan kita ngeklaim ya, mungkin dibanding pemerintah daerah, Pak, kami jauh lebih rigid menyiapkan data, biasa pemerintah daerah *tuh* main telepon, Pak. Nah, kalau kita kan *ndak* mau dan *ndak* mau, *ndak* mau, kita langsung ke lapangan, kita cek layak atau tidak, itu pun masih kita minta kepada pihak PU untuk ngecek kembali ya. Saya seringkali saya pasti bilang, Pak, kalau memang tidak layak tidak sesuai kriteria, batalkan, nanti akan jadi temuan, kalau jadi temuan kan masalah juga kita juga pusing ya.

Nah, tapi sekarang kan pintunya tidak satu, itu ada pintu lagi dari pemerintah daerah. Apakah nanti ini menjadi lebih baik setelah pintu ini kita buka kepada pemerintah daerah? menurut saya belum tentu juga kalau itu tolak ukurnya, belum tentu juga ya, karena apa? karena kami selalu, kalau saya ya pengalaman saya *ndak* pernah *ngotot*, Pak. Kita dengan teman-teman PU *ndak* pernah *ngotot*. Pak Lasarus, itu tidak layak, kalau *ndak* layak jangan, Pak, nanti jadi masalah, ketimbang jadi masalah, kan selalu begitu kita. Kita *enggak* pernah maksakan sudah *enggak* layak paksa, *enggak* ada *gitu loh*.

Nah, ini saya rasa ini juga perlu jadi bahan pertimbangan kita. Saya ngerti, Pak, kami tentu memahami kenapa ini menjadi dibuat seperti itu karena pertimbangan dari sisi akuntabilitas, ya. Nanti mungkin dari pemeriksaan BPK, BPKP, dan seterusnya lalu APH dan seterusnya tentu kita. Saya rasa kami-kami di sini ya soal-soal begitu semua, Pak Menteri, kami menjagalah, menjagalah, *enggak* mungkin gara-gara misalnya BPS *nih* jatah orang miskin misalnya masa segitunya *amat* kita kan, ya *enggak*lah saya rasa. *Toh* sampai hari ini pun saya tidak mendengar teman-teman *ngotot*, *gitu loh*.

Saya pernah ngalami, Pak, di beberapa tempat di tempat saya, ada tokoh-tokoh masyarakat yang *ngotot* tidak layak. Saya bilang Bapak mau

enggak diperiksa, kalau Bapak mau diperiksa Bapak paksakan aja nanti setelah jadi juga polisi datang, mau? takut, Pak, kita gitukan. Jadi saya rasa, Pak Menteri, mungkin ini saran saja supaya nanti teman-teman di sini *ndak* bingung gitu loh. Misalnya Pak Robert, ngusulin 10, tapi Pemdanya masuk 20 misalnya, ini kan soal nanti kita, dijaga menjaga hubungan kemitraan kita lah.

Saya *fair* saja ngomongnya. Apa yang kita takutkan ini? takutnya dari sisi akuntabilitas. Ayo kita jaga sama-sama kepada teman-teman Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati. Nah, kita jaga sama-sama *nih* soal akuntabilitas. Kalau memang tidak memenuhi syarat, ya enggak usah kita enggak usah *ngotot* kan begitu ya, Pak Hamka ya. Setuju ya kita soal ini, ya? supaya ini tidak menjadi rumit *gitu loh*. Saya coba tanya kemarin dengan Pak Dirjen Sumber Daya Air karena memang ini dipantau programnya *monggo* dipantau, Pak, silakan.

Sebetulnya kalau soal dipantau atau tidak, bukan sumbernya dari mana, Pak, menurut saya informasi itu berasal, tetapi sejujur apa, seserius apa, kita ngurus barang ini, sebertanggung jawab sebagaimana kita ngurus barang ini, itu tolak ukurnya menurut saya. Apakah Pemda itu jauh lebih rigid daripada kita mengusulkan? Belum tentu Pak, belum tentu. Kalau Pemda itu Pak pegawainya pergi *ndak* ada uang jalannya, *ndak* mau dia, Pak, lebih mudah dia *ndak* berjalan, uang jalannya dapat.

Nah, kalau kita enggak perlu uang jalan, Pak, kita sudah ada uang reses kok ngumpul sana, ngumpul sini udah ada, jelas *gitu loh* tanggung jawabnya dan bisa kita evaluasi. Kalau menurut saya jauh lebih *fair* dimana kasus misalnya terjadi tidak akuntabel dari sisi data, itu kita ungkap kepada siapa pengusul.

Misalnya di sini, saya misalnya udah lah daripada saya contohkan kepada yang lain: "Wah, Pak Lasarus, usulannya banyak enggak beres", tegur saya, Pak, sampaikan, saya juga enggak mau bermasalah dengan urusan beginian. Menurut saya ini jauh lebih baik *gitu loh* dalam konteks kita menjaga hubungan kemitraan.

Teman-teman sekalian,

Soal ini *enggak* perlu diulang ya, saya rasa ini yang disampaikan kepada saya dari kemarin, Pak Sekjen. Tempo hari, teman-teman, ketika saya tidak ada di tempat ya "Pak Lasarus boleh *ndak*?" saya bilang bicarakan saja, yang penting kita niatnya sama-sama baik dalam konteks memperbaiki supaya tidak susah teman-teman PU ngurus program ini dan kita juga jangan kasih soal-soal yang sulit kepada teman-teman PU, kan itu aja titik temunya. Nah, kalau titik temu itu sudah ada, kan harusnya tidak ada masalah. Begitu ya Bapak-Bapak sekalian ya.

Saya rasa demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Pak Menteri, singkat saja sekarang sudah jam 17.20, sebentar lagi kita mau buka puasa, jadi jawaban tertulis saja Bapak, yang Bapak pandang perlu saja,

Bapak jawab, yang Bapak pandang tidak perlu, *nggak* usah dijawab, Pak Menteri, nanti bisa dijawab tertulis saja oleh para Dirjen yang hadir, saya lihat tadi semua pada mencatat di sini, ya.

Pak Menteri, terima kasih tentu kami sampaikan, Pak, ini rapat kita setelah Pemilu pertama ya, inilah rapat kita pertama setelah Pemilu dengan Pak Menteri. Atas nama Pimpinan, dan seluruh Anggota Komisi V, Pak, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama kita yang luar biasa selama ini dan respon Pak Menteri yang luar biasa. Layak kita beri tepuk tangan buat Pak Menteri.

(TEPUK TANGAN DARI PESERTA RAPAT)

Tentu juga kepada seluruh Dirjen, Direktur, dan teman-teman yang ada di lapangan ya, yang bekerja keras selama ini membantu Pak Menteri dan Presiden tentunya dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi, Pak Menteri, dan mohon maaf manakala ada banyak hal-hal yang kurang berkenan dalam kemitraan ini berjalan.

Saya kasih kesempatan Pak Menteri.
Saya persilakan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Oke, terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Yang pertama, mungkin yang selain apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi yang terakhir tentang *programming*, jadi apakah itu IJD, apakah itu Padat Karya lainnya, P3TGAI, itu masalah *programming*. Jadi saya kira walaupun ada model-model *programming* yang akan menjadi teknokratis, tapi kan pasti ada yang perlu di-fleksibilitasnya, subjektivitasnya, untuk mengakomodasi aspirasi Bapak-Bapak, sehingga kita juga tidak gamang, bahwa ini semua aspirasi kita bisa menjawab *enggak*, ini *enggak*, pastinya semua ada bagaimana daerah-daerah yang *enggak* punya Anggota Dewan, itu kan juga kita harus, makanya kita harus kita akomodasi. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, saya kira kita sepakati bersama.

Ini semua sebetulnya dari awalnya dari *programming* IJD sehingga disuruh menyontoh untuk yang lain-lainnya seperti IJD *eh* karena *eh* dengan bantuan, atau menjadi apa, untuk meningkatkan akuntabilitas karena kalau kalau tidak, IJD itu harusnya ada 7, berapa? awalnya berapa triliun? 70 triliun ... (rekaman suara kurang jelas) sebetulnya, tapi kita sisir lagi menjadi 32 triliun, kemudian jadi 14,6 sekarang ada 15, jadi sudah mendekati 32 itu semua ada kriterianya *gitu*.

Jadi saya kira itu, Pak, hingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Robert juga, *kok* saya enggak ngerti *gitu* kan. Misalnya sekarang di IJD di Papua itu, di Papua Barat ada 153 miliar, di Papua 109, Pegunungan 91, Papua Tengah 91, Papua Barat Daya 32,4, dan Papua Selatan 204, jadi totalnya di Papua ini ada 679 ya, jadi semua mungkin juga selain juga *modeling*, *programming*, komunikasi tadi, termasuk nanti Kepala Balai Perumahan akan saya evaluasi, Pak. Terima kasih.

Kemudian yang kedua, tadi yang pertama disampaikan oleh Pak Dewo itu adalah terobosan untuk pembangunan jalan. Ini tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua dan oleh Pak Iwan tadi. Memang tujuannya IJD dulu waktu di sidang kabinet, pertama untuk mempercepat perbaikan jalan- jalan daerah yang rusak kemudian yang menghubungkan kawasan-kawasan produktif, kemudian kawasan pariwisata. Jadi saya kira ada kriterianya juga yang masuk di SIMPATI eh apa namanya? SITIA tadi itu kriteria.

Jadi saya kira sudah sama itu, Pak. Saya pernah saya sampaikan pada Pak Presiden ya, Pak. Di Kalbar itu juga menurut Pak Lasarus ya, untuk menghubungkan kawasan produksi sawit ke jalan nasional, butuh berapa hari? itu sudah busuk ya, itu yang ditembak duluan katanya. Jadi saya kira sebenarnya sudah sama kriterianya untuk IJD tadi.

Jadi saya terima kasih, Pak, termasuk Dieng tadi. Saya kira perlu Pak hubungkan karena sekarang kalau sudah tol sudah jadi, nah, sekarang tujuan kita misalnya membuka di Semarang, Kabupaten Semarang, kita buka *exit* untuk kawasan industri suruh misalnya kan, sekarang modelnya sudah apa levelnya sudah level membuka untuk melayani kawasan.

Sekarang ini mau menghubungkan ke Dieng, ya sudah kita buka dari tol itu untuk menghubungkan Dieng, apalagi cuma 30 kilo misalnya. Saya kira konsep itu yang akan ke depan ini akan kita utamakan, Pak. Kalau memang bukan APBN ya, IJD akan kita masukkan ke situ. Itu yang saya kira untuk *programming*.

Saya kira mohon maaf, kalau ada kawan-kawan kami, kepala balai yang kurang kurang komunikatif. Kalau yang yang apa SITIA dan yang lain- lain itu kan *tool*-nya saja, tapi kan tidak bukan berarti kita percaya apa serahkan sepenuhnya pada komputer, *programming* itu enggak bukan komputer, tapi juga harus ada subjektivitas kita ya, itu yang pertama, Pak.

Sedangkan yang lain-lainnya, saya kira ini teman-teman apa Bapak Dirjen mencatat semua *kayak* Bu Cen, Sei Gong, tidak hanya Sei Gong. Itu waduk bukan bendung Bu, waduk, ya, embung di mana Kepri Sei Gong dan Trembesi. Sebetulnya tugas kami membuat itu, kemudian Batam dan memanfaatkan air itu oleh Batam.

Sekarang sudah ada swasta yang mau KPBU untu memanfaatkan Sei Gong itu. Kebetulan baru kemarin komunikasi dengan kami untuk minta izin

untuk supaya memanfaatkan Sei Gong. Sebetulnya tugas kami menyiapkan *raw water*-nya, selanjutnya yang memanfaatkan air itu Batam.

Kemudian yang lain-lainnya. Saya kira kalau tol ini juga, kami akan sampaikan di sini. Kami sudah dapat apa surat dari Asosiasi Tol Indonesia, menyampaikan ruas-ruas tol mana, semua ruas tol yang akan mendapatkan diskon 2 hari arus mudik dan 2 hari arus balik, ada semua ada yang 10% ada yang 20% tergantung BUJT-nya.

Yang ketiga juga pompanisasi Kementan. Tadi saya menyampaikan ada 395.000 hasil dari pembangunan bendungan, rehabilitasi irigasi, dan sumur pompa kita 3.600, tujuannya ke situ, Pak, ya. Jadi, kami sudah berkoordinasi keras dengan Kementan, karena Kementan meminta 5,8 triliun untuk membeli berapa, berapa pompa, Pak? 18.000? 18.000 pompa. Saya bilang mau dipakai di mana? Lahannya di mana? Airnya dari mana?

Oke, kemudian beliau Dirjen CSDA koordinasi dengan Dirjen Tanaman Pangan survei ke lapangan bersama dengan balai. Sekarang hanyadidapatkan untuk daerah tanda hujan 530.000 hektar dari 2 juta hektar yang yang diusulkan, jadi itu *me-reduce* termasuk airnya itu dari mana nanti *gitu*. Bahkan, mereka memompa dari apa dari jaringan irigasi, saluran irigasi. Sayabilang ini nanti ngerusak P3A kita ngerusak sistem irigasi kita *gitu*, baik kemarin di Gumbasa juga ada memompa dari irigasi itu, saya marahin. Jadi, saya kira saya, surat saya ke Menteri Keuangan, bahwa kami bisa untuk 395.000 hektar.

Makanya, tadi saya laporkan pada sidang apa pada rapat hari ini. Maksudnya adalah untuk men-juga ini 390.000 hektar, ini laporan kami tadi. Di mana saja itu? Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua, semua 395.334 hektar. Intensifikasi, menambah luas tanam, bukan menambah luas irigasi, tapi luas tanam karenadi sana ada airnya, ada sawahnya, ada petaninya, tinggal *nanam* gitu, Pak.

Jadi sekarang untuk ya yang pertanian, beliau sudah koordinasi terus dengan Dirjen Tanaman Pangan untuk melihat daerah irigasi daerah lahan mana yang perlu dipompa, bahkan kami kalau yang ini untuk yang kekeringan kita ingin coba, nah kita coba jatuh ke daerah-daerah sungai yang kering kita bor, pasti ada air itu. Nah, itu baru dipompa karena waktu kekeringan kemarin kering semua air *eh* sungai itu kita bor, Pak, dasar sungainya kita bor karena *enggak* ada air kecuali di situ pasti ada.

Kemudian untuk siapa ini, Kolpajung gitu kan. saya kira pasar Kolpajung, Juni-Juli ini sudah selesai bisa sekarang sudah 61% termasuk stadion MU/Madura United, nah kalau pasar biasanya Pak Presiden akan meresmikan sendiri kalau pasar.

Kalau yang Pak Djenri, Kenapa BPJN Sulut merangkap Malut, Maluku Utara, karena Kepala Balai Maluku Utara *stroke*, Pak, jadi untuk *mengganjeli* sebentar, ini sedang proses untuk (*suara kurang jelas*).

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak Djenri?

Pak Menteri bicara sama Pak Djenri soal kepala balai.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Dan alokasi IJD tidak berkabupaten, Pak, enggak ada, enggak ada arahan itu, enggak ada perkabupaten sekian miliar enggak ada, tergantung ruasnya, ya kayak Jawa Barat itu kemarin yang 2023 cuman kecil, cuman 300 atau 400 hanya Pak, karena yang ngusulkan hanya Pak Mulyadi karena yang di daerah selatan enggak ada yang *care*, kepala dinasnya enggak ada *care*, kita *nguprak-nguprak* untuk ngusulkan.

Jawa Tengah *tuh* hampir 1 triliun, karena yang rusak, yang rusak. Oke, nanti kalau yang jembatan apa tadi di Sintang, Melawi, nanti kita tunggu Pak Lasarus jadi gubernur, kita bangun. Kemudian yang apa bendung di Kabupaten Muna dan sebagainya per Dapil, saya kira, Bapak-Bapak Dirjen sudah mencatat dan nanti akan *Insya Allah* ditindaklanjuti. Demikian Bapak yang kami bisa apa jelaskan.

Kalau pasar Kroya, *ah* saya kira, untuk padat karya yang kami janjikan dulu, untuk yang dari sisa lelang, memang sekarang yang kemarin dilaporkan oleh Pak Sekjen sekitar 400 miliar, sekarang sudah ada sisa lilang lagi 600 tambahan 200, 600 miliar, jadi semua sisa lelang sudah saya larang untuk tidak dipakai meneruskan pekerjaan. Biasanya kan dipakai, ini kita kumpulkan untuk mencukupi padat karya, dan kami sekarang sedang mengusulkan tambahan anggaran karena ada tugas-tugas baru yang sekarang sedang diproses penganggarnya di Kementerian Keuangan, kami usulkan sekitar berapa Pak? yang totalnya? totalnya sekitar, kita akan dapat tambahan sekitar 35, 40, tapi yang sedang siap sedang akan kerja ini adalah 20 triliun, pasti akan ada sisa anggaran, sisa lelang. Jadi saya tidak khawatir untuk menjaga kredibilitas saya pada Bapak-Bapak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tepuk Tangan buat Pak Menteri.

(TEPUK TANGAN DARI PESERTA RAPAT)

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Pimpinan, Pimpinan.

Tambahan sedikit, Pimpinan.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pak Menteri, Pimpinan.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Sebentar, sebentar, sebentar, sebentar, biar Pak Menteri, sudah selesai kah?

Sudah Pak.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Sebentar dulu tunggu dulu, Pimpinan bicara.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Oh, siap.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Silakan Pak Robert, 1 menit Pak Robert, kita mau buka puasa ini.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Pak Menteri, saya lupa satu Pak Menteri, tadi Bapak bicara soal menghubungkan antara daerah. Saya kira saya sudah ngomong berapa kali Pak Menteri di sini soal menghubungkan Pelabuhan Pepera yang ada di Asmat untuk bisa tembus ke jalan menuju ibukota, Kota Yahukimo, itu Dekai. Itu tinggal 20, paling panjang 23 sampai 25 kilo saja, Pak Menteri, dan itu daerahnya datar.

Saya kemarin sempat ke sana diajak sama Bupati, kita pergi lihat itu medannya tidak sesulit yang kalau kita Jayapura, Wamena, maupun yang itu karena daerahnya sangat datar dan curah hujannya tidak terlalu tinggi, itu daerah panas. Saya kemarin 2 hari di sana, keliling, diajak lihat itu dansayang sekali kalau itu tidak cepat dibuka.

Untuk membuka akses dari pelabuhan itu untuk menurunkan angka kemahalan yang di sana dan itu sangat dibutuhkan saya kira, untuk bisa segera, karena pelabuhannya sudah ada, Pak Menteri. Jadi tinggal buka akses jalan dari karena itu dia masuk ke Papua Selatan tidak mungkin dari Yahukimo, untuk bisa membuka akses itu karena dia ada di Asmat.

Terima kasih, Pak Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Saya kira ini ada satu Pak, untuk yang 600 miliar kalau Bapak setuju, kita kumpulkan semua untuk BSPS.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Iya, terima kasih, Pak Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Eenggak, enggak setuju enggak? kalau setuju....

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Setuju, Pak Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Sedangkan nanti yang lain-lainnya baru untuk P3TGAI, nanti.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, nyusul, baru nyusul.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Tapi yang 600 ini kalau Bapak-Bapak setuju untuk BSPS.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Setuju ya.

Baik, ya

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M):

Pak menteri *dikit*, eh, Pak Pimpinan *dikit*.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Dikit, ya.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M):

Dikit, Pak Menteri, saya nunggu dari tadi enggak ada yang dijawab tuh, tadi sudah nyebut pasar Kroya, itu maksudnya apa gitu loh?

Makasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Saya mau gocek nanti direkam, soalnya enggak enak.

Jadi pasar Kroya sudah dilelang, Bu, cuma anggarannya sedang diwujudkan dihasilkan di Kementerian Keuangan. Nah, tapi sudah bersamaan itu kita sudah proses lelang.

Makasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Sudah jelas, Bu?

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M):

Jelas, makasih. paling habis itu minta ada seremonial dikitlah bareng.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oke, Mas, silakan Anda mau mau buka, buka saja.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Sudah puas, Bu?

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M):

Enggak berani komen.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Monggo, Mas Dewo, silakan Mas Dewo.

F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya dukung Pak Menteri TKDN minimal 25% tapi tolong, Pak, implementasinya dimonitor karena saya banyak ada BUMN menggunakan material yang TKDN-nya 0%, satu itu.

Yang kedua, tolong Pak jalan tol Demak - Tuban, mohon dibantu,

Makasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, sudah ya, cukup ya, baik.
Hah? *monggo* cepat silakan, Pak, buruan.

F-GERINDRA (DRS. H. MULYADI, M.MA.):

Enggak saya hanya ingin direspon, Pak, karena saya ditunggu warga Parung Panjang, *Insy Allah* terjadi kan Pak ya, IJD di Parung Panjang?

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PUPR RI (DR. DWI PURWANTORO, S.T., M.T.)

Kita tahun tahun ini nangani sekitar 6 kilometer, Pak, di jalan provinsinya. Kalau yang jalan tambangnya kan, tanahnya belum siap juga, iya siap.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Intervensi 6 kilometer.

Terakhir saya, Pak, sedikit Pak Menteri, Pak Dirjen Sumber Daya Air, di Kalimantan Barat di Sanggau itu ada bendungan Merowi, Pak, namanya dulu ini pernah ditangani oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pak Menteri, arealnya memang kurang dari 2000 hektar, Pak. Saya kemarin kebetulan ada IJD di situ, Inpres Jalan Daerah akhirnya saya tembus ke bendungan itu *mangkrak* sampai hari ini tidak berfungsi.

Maksud saya kalau memang boleh diambil alih oleh pusat, ya, kalau bukan bendungan ya kita pakai waduk aja, sayang sekali Pak Menteri.

Bendung Pak, sudah ada bendungnya situ tapi saya kemarin minta Pak Pram, Mas Pram, kepala balai, untuk datang ke situ, ya. Saya waktu itu tembus ke situ Pak, ya, sama dengan Dirjen *eh* sama Pak kepala balai, Kepala Balai Bina Marganya, sangat disayangkan sekali lahannya cukup bagus di situ Pak, potensinya bagus, dan sudah lahannya juga sudah tinggal kita perbaiki saja sebetulnya, tapi secara teknis mungkin perlu dilihat karena teman-teman dari SDA pasti lebih, jauh lebih paham ketimbang ini dibiarkan mangkrak seperti ini. Saya rasa itu saja tambahan sekarang kita langsung ke kesimpulan rapat.

Baik.

Saya bacakan kesimpulan rapat, mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum buka puasa.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI Dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Senin, 1 April 2024

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR dalam APBN tahun anggaran 2023, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam tahun 2023 sebagai berikut:

a. Realisasi keuangan tahun 2023: 95,90%, kemudian realisasi fisiknya 97,11%.

b. Terhadap program kegiatan tahun 2023 yang tidak teralisasi, Komisi V DPR RI minta Kementerian PUPR agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.

2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI memberi meminta Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk:

a. Mempercepat realisasi program dan kegiatan tahun 2024, utamanya program infrastruktur berbasis masyarakat;

b. Meningkatkan alokasi untuk percepatan penanganan jalan daerah;
dan

c. Memperhatikan keberlanjutan pemberatan pembangunan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Jadi poin yang terakhir ini, Pak Menteri, pikir perlu kami masukkan karena sudah mulai ada *riak-riak* di sekitar IKN sana dan kami harap tentu PU dalam hal ini walaupun sebetulnya ini urusannya otorita, Pak, tapi kan infrastruktur ini adalah domainnya Kementerian PUPR dan kita menangani di sana.

Kami tentu menginginkan supaya seluruh kegiatan yang ada di IKN tentu juga ramah bagi masyarakat lokal yang memang sudah ada di sana dan seluruh persoalan bisa diselesaikan secara baik.

Itu tawaran kesimpulan rapat sore ini, teman-teman Komisi V, Pimpinan, apakah ini dianggap cukup?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Cukup.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Cukup?
Saya ketok.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Pak Menteri?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Tepuk tangan buat kita semua.

(TEPUK TANGAN DARI PESERTA RAPAT)

Dengan demikian, selesailah rapat kita pada sore hari ini.

sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan kata-kata penutup.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Bapak Ketua, Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi V yang terhormat dan kami hormati,

Saya hanya mengucapkan terima kasih atas apa, atas arahnya terutama tentang kesepakatan untuk melengkapi padat karya yang kita sama-sama, kita upayakan, untuk bisa kitaenuhi apa yang menjadi aspirasi Bapak-Bapak sekalian. Tentunya tidak bisa *sak dhek, sak nyek*, tapi kita bertahap karena anggarannya nanti, tapi semua akan kita kan Bapak-Bapak bisa memonitornya, mengontrolnya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Menteri.

Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V mengucapkan terima kasih untuk seluruh atensi dalam rapat ini dan mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap syukur *alhamdulillah* rapat ini....

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Saya sebentar, Pimpinan.

Saya mau kasih jempol aja tadi, luar biasa tadi pesannya terhadap masyarakat lokal IKN, memang Pimpinan top.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Dinda, terima kasih, kita sama-sama orang Kalimantan punya tanggung jawab moral, ya, pasti Pak Menteri memahamilah, bagaimana menangani kondisi yang ada di IKN sana. Tentu Dinda, kita berharap seluruh pembangunan di IKN sana juga bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat lokal bukan mendatangkan masalah, itu ya.

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat ini saya nyatakan selesai dan saya tutup.

Terima kasih.

*Wallahul mufawiq Ila aqwamit thoriq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.45 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

**JAKARTA, 1 APRIL 2024
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002